



Katalog BPS: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2002-2007



Badan Pusat Statistik - Indonesia

NERACA ARUS DANA INDONESIA

2002 - 2007

<https://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN NAD INDONESIA

BPS, BANK INDONESIA, DEPARTEMEN KEUANGAN

**NERACA ARUS DANA INDONESIA
2002 - 2007**

Katalog BPS/ *BPS Catalogue* : 9502002
Nomor Publikasi/
Publication Number : 07230.0801
I S S N : 0854 .6967

Ukuran Buku/ *Book Size* : 21,5 cm x 28,5 cm
Jumlah Halaman/ *Total Pages* : 144 Halaman/ *Pages*

Naskah/*Manuscript*.
Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri/
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Gambar Kulit/*Cover Design*:
Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri/
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Diterbitkan Oleh/*Published by*:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS - Statistics Indonesia

Dicetak Oleh/*Printed by*:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/
May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2002-2007 merupakan publikasi kedelapanbelas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Publikasi ini merupakan perwujudan dari hasil kerjasama Tim Penyusunan NAD Indonesia yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan.

NAD Indonesia 2002-2007 ini masih mengikuti format publikasi NAD tahun sebelumnya baik dari segi pembagian sektor/institusi maupun kategori transaksi finansialnya. Beberapa angka yang disajikan dalam publikasi ini mengalami perbaikan sesuai dengan revisi data pendapatan nasional. Di samping itu, sejalan dengan makin baiknya data lembaga keuangan non-bank, maka dalam publikasi ini ditambahkan pula analisis mengenai sektor tersebut. Disadari bahwa publikasi ini masih mengandung kelemahan terutama dari segi kecepatan pengadaan datanya. Oleh karena itu upaya mempercepat pengadaan data dan meningkatkan mutu publikasi ini terus dilakukan. Dalam konteks ini masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat dihargai.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan NAD Indonesia ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Diharapkan kerjasama yang baik ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2008

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

RUSMAN HERIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum	5
2.2 Kerangka Teori NAD	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional	10
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan	13
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana	15
2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD	17
BAB III KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	21
3.1 Kerangka NAD Indonesia	21
3.2 Sumber Data	28
3.3 Metode Penyusunan	32
BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA INDONESIA	37
4.1 Neraca Pembiayaan Sektoral	37
4.2 Tinjauan Ekonomi Indonesia Berdasar NAD 2007	56
4.3 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2007.....	60
4.4 <i>Financial Deepening</i> dan <i>Velocity of Income</i>	66
BAB V KESIMPULAN	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	
TABEL-TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi, maka untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana, selanjutnya disebut sebagai sektor surplus, dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit.¹ Peranan lembaga keuangan ini pada masa lalu kurang begitu menonjol dan di lain pihak penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi, sementara itu sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, maka pemerintah sejak permulaan dasawarsa 1980 mulai melakukan reformasi ekonomi, khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "go-public", maka pilihan para pemilik dana bertambah lagi dengan investasi finansial yang bersifat langsung dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, maka arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi real merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data dimaksud selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor real) telah disajikan secara berkala baik dalam Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya.² Kebanyakan neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Kemudian bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi real maupun investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi real karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga tergambar arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit. Arus finansial tersebut lebih lanjut merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan di atas, Badan Pusat Statistik sejak tahun 1987 telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas, tetapi usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya telah berhasil disusun NAD Indonesia 1984-1988, yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2, New York 1968.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun secara berkala NAD Indonesia. Publikasi NAD ketujuhbelas ini mencakup periode 2001-2006, yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa mendatang usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2001-2006 merupakan publikasi ketujuhbelas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro, yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarkan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, dan penyebab "*financial deepening*" berdasarkan data NAD 2001-2006.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Setelah itu dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Untuk mendapat gambaran yang jelas perlu diketahui

bagaimana cara membuat NAD dari perusahaan. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan diberikan di akhir bab ini.

- Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.
- Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai neraca pembiayaan modal sektoral, keterkaitan finansial antar sektor dan penyebab *financial deepening*.
- Bab V: Kesimpulan, memberikan ringkasan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

<https://www.bps.go.id>

BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta nonfinansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena sistem ini memasukkan juga sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Dalam sistem neraca nasional dicakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca ini menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dikenal juga dengan sebutan neraca real. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor real.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Di samping itu, diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Untuk para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³ Transaksi finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$.

Biasanya pendapatan sektor rumah tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran, sebaliknya sektor swasta nonfinansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor swasta nonfinansial harus meminjam dari sektor rumah tangga. Sektor lainnya, misalnya bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD, menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yang pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan yang kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikkan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "net" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. Padahal dalam NAD hanya dicatat perubahan dalam setahun. Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor keuangan, rumah tangga, pemerintah, bisnis dan luar negeri. Sektor luar negeri memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk Indonesia. Di samping itu, dalam contoh ini hanya beberapa jenis kategori transaksi yang dicantumkan.

**TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)**

TRANSAKSI		KEUANGAN		RUMAH TANGGA		PEMRINTAH		BISNIS		LUAR NEGERI		TOTAL	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
0100	Tabungan Bruto		1		19		6		15		3		44
0200	Perolehan Barang Modal	1		9		8		26		0			44
0300	Pinjaman Neto	0		10		-2		-11		3			0
0400	Selisih Statistik	0		2		-1		0		-1			0
0500	Inv. Finansial Neto	0		8		-1		-11		4			0
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	14		12		5		13		16			60
0700	Jumlah Sumber Finansial		14		4		6		24		12		60
0800	Cadangan Valas		1							1		1	1
1000	Deposito		6	3		3		1		-1		6	6
1100	Surat Berharga (Jangka Pendek)	1	3			1		1				3	3
1200	Pinjaman	13			4		4		6	11	10	24	24
1300	Modal dan Penyertaan			2		1		4		1		4	4
1400	Surat Berharga (Jangka Panjang)						-1	11		-1		-1	-1
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		2	2								2	2
1800	Kredit Dagang								10	1	2	12	12
9000	Rupa-rupa		2	5			3		4	4		9	9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada Tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor rumah tangga, kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto sebesar Rp 19 triliun, sedangkan tabungan bruto sektor pemerintah hanya sebesar Rp 6 triliun. Sektor rumah tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan modal sebesar Rp 9 triliun, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di rumah tangga berupa deposito, modal dan penyertaan, cadangan asuransi dan pensiun, serta rupa-rupa masing-masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor rumah tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah Rp 12 triliun. Pada saat yang bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar Rp 4 triliun. Berdasarkan persamaan akuntansi, pinjaman neto harus sama dengan investasi finansial neto, karena pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih

statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi dari sumber data yang berbeda. Pinjaman neto diperoleh dari neraca real sedangkan investasi finansial neto dari neraca finansial. Dalam Tabel 2.1 untuk sektor rumah tangga tampak bahwa pinjaman neto sebesar Rp 10 triliun dan investasi finansial neto Rp 8 triliun, atau terdapat selisih statistik sebesar Rp 2 triliun. Sektor bisnis perilakunya berbeda dengan rumah tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan penyusutan, yang menghasilkan tabungan bruto sebesar Rp 15 triliun. Pembentukan modal sektor bisnis sebesar Rp 26 triliun melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Untuk itu, sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar Rp 11 triliun. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewajiban finansial sebesar Rp 24 triliun. Sebagian dari dana tersebut (Rp 13 triliun) digunakan untuk membeli harta finansial dan sisanya sebesar Rp 11 triliun merupakan pinjaman neto. Dalam Tabel 2.1 tampak bahwa untuk sektor bisnis, pinjaman neto sama dengan investasi finansial neto, oleh karena itu selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi sektor ini sangat besar peranannya bagi kegiatan pasar finansial, khususnya bertindak sebagai perantara dalam meyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Dalam Tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan dana dari kegiatannya berupa tabungan bruto sebanyak Rp 1 triliun, sama dengan penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol. Namun demikian jumlah pertambahan harta finansial sektor keuangan cukup besar, Rp 14 triliun yang berasal dari surat berharga jangka pendek Rp 1 triliun dan pinjaman sebesar Rp 13 triliun. Sumber dananya atau pertambahan jumlah kewajiban juga sebesar Rp 14 triliun yang merupakan pertambahan kewajiban deposito sebesar Rp 6 triliun dan sisanya Rp 8 triliun merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara pertambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula pinjaman neto dan selisih statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar Rp 6 triliun, tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah Rp 8 triliun, sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebanyak Rp 2 triliun. Dari sisi kewajiban (sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar Rp 4 triliun dan Rp 3 triliun berupa kewajiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali obligasi pemerintah

yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar Rp 1 triliun. Dengan demikian jumlah seluruh penambahan kewajiban sektor pemerintah menjadi Rp 6 triliun. Kalau dilihat dari sisi harta (penggunaan), jumlah keseluruhannya sebesar Rp 5 triliun yang terdiri penambahan deposito, surat berharga jangka pendek, dan penyertaan modal. Perbedaan antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah $5-6=-1$ triliun rupiah. Pada hal jika dilihat pinjaman netonya minus Rp 2 triliun, sehingga menimbulkan selisih statistik minus Rp 1 triliun.

Sektor luar negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk sajian NAD. Defisit neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar Rp 3 triliun (lihat Tabel 2.1). Angka ini menunjukkan surplus sebesar Rp 3 triliun dari sudut pandang luar negeri dan besaran ini dimasukkan pula ke dalam kategori tabungan bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak mempunyai investasi real. Dalam NAD, sektor luar negeri mempunyai klaim finansial atas modal fisik, tidak dalam pembentukan modal secara langsung, sehingga nilainya sama dengan nol. Di sisi penggunaan, sektor ini menaikkan jumlah harta finansialnya sebesar Rp 16 triliun, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sejumlah Rp 11 triliun. Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau merupakan penambahan kewajiban terhadap Indonesia sejumlah Rp 12 triliun. Dengan demikian investasi finansial netonya $16-12=4$ triliun rupiah tidak sama dengan pinjaman netonya (Rp 3 triliun), sehingga terjadi selisih statistik sejumlah Rp 1 triliun.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansial dicatat dua kali, satu sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap harta finansial suatu sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima (kewajiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar Rp 24 triliun (ditunjukkan dalam Tabel 2.1 pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta nonfinansial atau investasi real sebesar Rp 44 triliun.

Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam matriks NAD. Misalnya deposito, yang merupakan kewajiban sektor keuangan meningkat sebesar Rp 6 triliun. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Dalam Tabel 2.1, jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa rumah tangga dan pemerintah menambah hartanya masing-masing sebesar Rp 3 triliun, sementara sektor bisnis menambah Rp 1 triliun, sedangkan luar negeri menurunkan hartanya sebanyak Rp 1 triliun.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1), cadangan asuransi jiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor asuransi dan sebaliknya merupakan harta (sisi penggunaan) bagi rumah tangga. Ternyata hubungan semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD.⁴

Jika kembali diperhatikan Tabel 2.1, kenaikan harta berupa modal pada rumah tangga sebesar Rp 2 triliun mungkin berasal dari modal saham tahun yang lalu dan modal yang disimpan oleh sektor keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Dalam sistem neraca nasional (*integrated system of national accounts*) setidaknya ada 4 neraca pokok, neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri, yang harus disajikan. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan berapa besar tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiayai pembentukan modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri memperlihatkan transaksi dengan luar negeri baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor dan impor) maupun pinjaman dan transfer modal.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran, dan

⁴ Sebenarnya NAD dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah tidak dapat diketahuinya secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penyajian kedua, yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab IV.

neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan tabungan bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan pembentukan modal tetap dan pinjaman neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca pendapatan dan pengeluaran (*income and outlay accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca pendapatan dan pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat dipersamakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Dalam sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun nonfinansial (disebut *current expenditure*). Angka tabungan yang berasal dari neraca pendapatan dan pengeluaran selanjutnya dibawa ke dalam neraca modal (*capital finance accounts*), yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat tabungan bruto dan pembentukan modal atau harta real yang terdiri dari pembentukan modal tetap bruto ditambah perubahan stok. Dalam NAD juga dicatat pembelian neto barang tak berwujud, seperti: hak paten dan nama baik (*goodwill*) walaupun data semacam ini tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja.

NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD, surplus/defisit neraca pembayaran adalah negatif/positif tabungan di sektor luar negeri untuk NAD. Bagian neraca modal dalam neraca pembayaran mencatat transaksi luar negeri menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

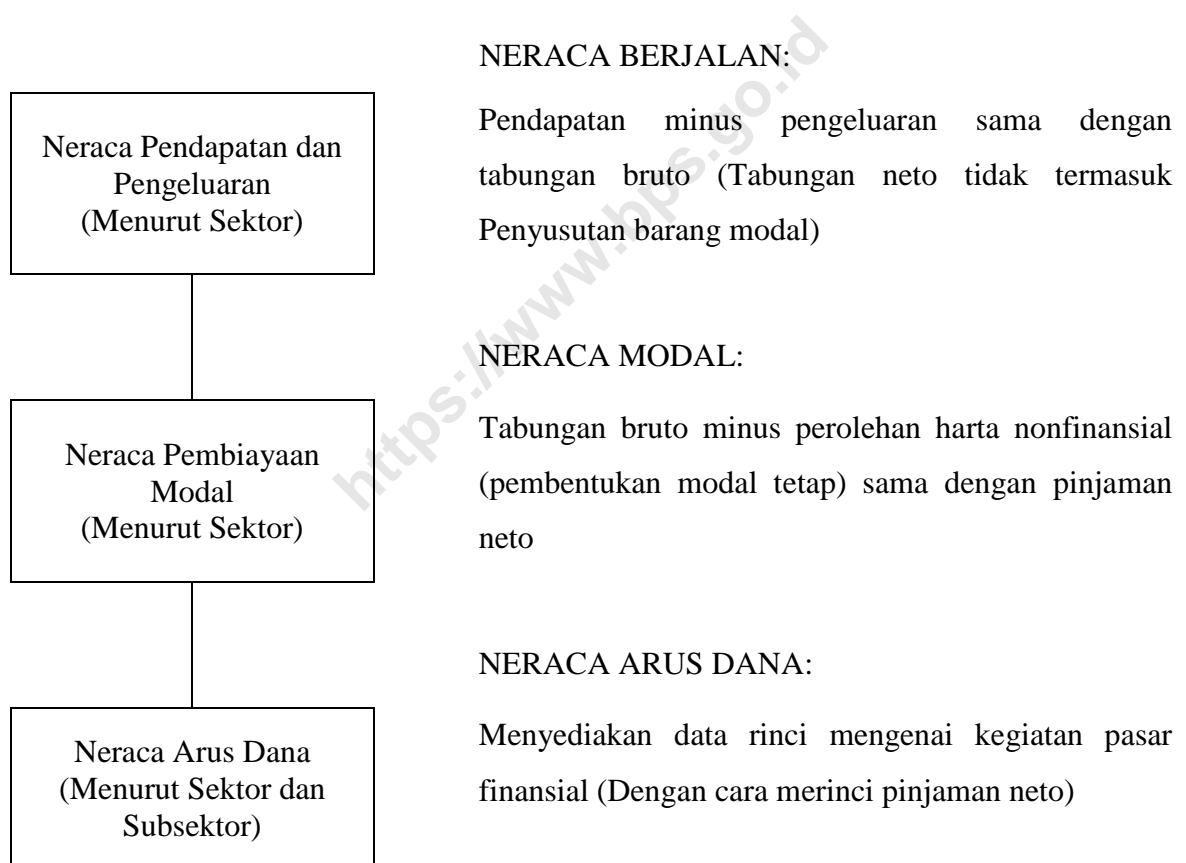
Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca real (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional.

Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor real melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi melalui variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris. Misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kaitan antara neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal dengan neraca arus dana diberikan seperti dalam Bagan 1 berikut.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan tabungan bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam neraca modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara tabungan bruto yang

berasal dari neraca pendapatan dan pengeluaran dengan jumlah pembentukan barang modal merupakan pinjaman neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya pinjaman neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Perusahaan biasanya membuat paling sedikit dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu saat tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi

$$\mathbf{HARTA = KEWAJIBAN}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat dirubah menjadi

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta real dan harta finansial. Harta real mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

$$\mathbf{HARTA REAL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL}$$

atau

$$\mathbf{HARTA REAL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL DAN PENYUSUTAN (MP)}$$

Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut

$$\mathbf{HR}_t + \mathbf{HF}_t = \mathbf{U}_t + \mathbf{MP}_t,$$

dan

$$\mathbf{HR}_{t-1} + \mathbf{HF}_{t-1} = \mathbf{U}_{t-1} + \mathbf{MP}_{t-1}$$

Sekarang jika kedua persamaan ini dikurangkan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

$$\Delta\mathbf{HR}_t + \Delta\mathbf{HF}_t = \Delta\mathbf{U}_t + \Delta\mathbf{MP}_t$$

Dengan mengganti \mathbf{MP}_t dengan \mathbf{TB}_t (tabungan bruto) persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi

$$\Delta\mathbf{HF}_t - \Delta\mathbf{U}_t = \Delta\mathbf{TB}_t - \Delta\mathbf{HR}_t$$

Berdasarkan persamaan terakhir dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi

$$\Delta\mathbf{TB}_t + \Delta\mathbf{U}_t = \Delta\mathbf{HR}_t + \Delta\mathbf{HF}_t$$

dan memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta real dan harta finansial).

Persamaan di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan

merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. NAD juga konsisten artinya data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (*data base*), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Bagi para pengamat ekonomi makro yang tertarik dalam menganalisis kaitan antar sektor finansial dan real dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi real.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor swasta nonfinansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Apalagi jika data tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen

dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi apakah sebagai individu atau perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika diabaikan biaya transaksi masing-masing jenis portfolio, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik dalam meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap suatu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena, pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun

ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks membuat perencanaan, dapat dimulai dengan perkiraan investasi real untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan perkiraan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tak dapat dihindarkan. Di samping kelemahan sumber data, di bawah ini dijelaskan pula beberapa keterbatasan NAD berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data, membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca, dan arus sebenarnya (*true flows*).

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Tapi penurunan piutang dagang misalnya, belum berarti penurunan kas.

2.6.2 Konsolidasi dan Gabungan Neraca

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi

penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 "Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (*true flows*) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu yang diakibatkan karena: (1) *keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs*, (2) *capital gains dan losses*, (3) *perubahan klasifikasi sektor* dan (4) *perubahan dalam prosedur akuntansi atau penyusunan laporan keuangan*.

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya, nilai "*true flow*" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta atau kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing menggunakan kurs yang sama. Demikian pula dilakukan untuk periode sebelumnya dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah.

Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan angkanya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) *Capital Gains and Losses* serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/ penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan *capital gains/losses* yang tercermin dalam laporan rugi/laba. Walaupun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan *capital gains/losses* sebagai pendapatan, karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar adalah laporan keuangan perusahaan, maka penilaian kembali, apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD.

Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain. Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Misalnya, penilaian pada akhir tahun akan berbeda bila digunakan sistem "*last in first out*" (LIFO) atau "*first in first out*"

(FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena berdasarkan pada data yang ada.

Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, seolah-olah terjadi penurunan level neracanya, karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan nonfinansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin pula berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui besarnya tingkat kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi misalnya dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun, berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Dari pengertian ini paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya.

Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antar kelompok.

Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri dan sebagainya.⁵ Berbeda dengan cara pembagian tersebut, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi.⁶ Alasan pembagian tersebut adalah karena transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi ke dalam jumlah sektor

⁵ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari *International Standard Industrial Classification (ISIC)*.

⁶ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Untuk tujuan tersebut biasanya unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam lima sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan luar negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Lembaga keuangan khususnya bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi perusahaan adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam prakteknya, keempat sektor yang disebut pertama (kecuali luar negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, kelima sektor di atas, terkecuali luar negeri, dikelompokkan menurut sektor keuangan dan bukan keuangan. Dengan demikian dalam analisis Neraca Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor keuangan, bukan keuangan dan luar negeri. Sektor keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan berfungsi sebagai penghubung atau perantara (*intermediaries institution*) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor luar negeri merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan nonresiden.

Dalam sektor keuangan, paling tidak harus muncul sektor bank dan bukan bank atau seringkali disebut sebagai lembaga keuangan lainnya, dengan pertimbangan bahwa hanya sektor bank saja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang giral, sedangkan sektor bukan bank tidak diizinkan melakukannya (*nonintermediaries institution*). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Di samping itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini sektor keuangan dirinci ke dalam sektor Otoritas Moneter, sektor Bank dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Moneter dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Bank terdiri dari bank umum atau BPUG, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perbankan syariah. Khusus bank

umum atau Bank Pencita Uang Giral (BPUG) secara spesifik dapat dibedakan menjadi Bank Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank campuran, dan bank asing. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka data yang dicakup untuk sektor bank ini hanya meliputi bank umum atau BPUG saja. Sedangkan untuk BPR dan perbankan syariah data masih belum lengkap.

Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor keuangan bukan bank tidak sebaik yang dimiliki sektor perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor non bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu perusahaan pembiayaan, modal ventura, asuransi, pegadaian dan dana pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, maka peranan sektor ini secara wajar juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu pembentukan sektor asuransi juga seharusnya dibuat cukup rinci dalam NAD tetapi karena keterbatasan data yang tersedia, sektor ini masih bergabung dalam sektor keuangan bukan bank. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program asuransi sosial. Jenis usaha asuransi dibedakan menjadi tiga yaitu usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi. Usaha penunjang asuransi meliputi usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi. Sedangkan program asuransi sosial meliputi program asuransi sosial yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT. Jasa Raharja, PT. Taspen, PT. JAMSOSTEK dan Perum ASABRI.

Lembaga keuangan bukan bank lainnya terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian dan dana pensiun. Termasuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan adalah jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit Walaupun peranannya tidak sebesar sektor bank atau asuransi, tetapi akhir-akhir ini perkembangannya cukup berarti, terutama untuk dana pensiun. Suatu kekhasan di dalam sistem finansial Indonesia adalah adanya sektor pegadaian yang secara teknis operasinya masih sangat terkait dengan sektor pemerintah. Di negara-negara lain juga terdapat sektor pegadaian tetapi diselenggarakan oleh swasta.

Lain halnya dengan sektor keuangan, sektor bukan keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor real, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang menggerakkan roda perekonomian, yakni sektor pemerintah, perusahaan pemerintah termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG, perusahaan swasta, koperasi dan rumah tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri dalam NAD.

Sektor terakhir sebagai pelengkap sistem NAD adalah sektor luar negeri. Sektor ini secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk Indonesia dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor di antaranya merupakan sektor keuangan, dan hanya 9 untuk sektor bukan keuangan serta satu sektor luar negeri. Tetapi karena keterbatasan data, maka dalam publikasi ini hanya disajikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, terdiri dari Otoritas moneter, Bank Umum (BPUG), lembaga keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG), Bisnis (Perusahaan Swasta, dan Koperasi), Rumah Tangga dan Luar Negeri. Khusus untuk perusahaan modal ventura datanya masih belum mencukupi.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

★ *Otoritas Moneter*

★ *Bank*

- Bank umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG)
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Perbankan Syariah

★ *Lembaga Keuangan Lainnya*

- Perusahaan Pembiayaan (pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit)
- Peransuransian (usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program asuransi sosial)

- Dana Pensiun
- Pegadaian

SEKTOR BUKAN KEUANGAN

- ★ *Rumah Tangga*
- ★ *Pemerintah (Pusat dan Daerah)*
- ★ *Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG)*
- ★ *Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial dan Koperasi)*

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 *Pembagian Kategori Transaksi*

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian atas berisi tabungan bruto dan perolehan harta nonfinansial yang dalam istilah lain disebut investasi real atau pembentukan modal. Tabungan bruto dibagi dua yaitu penyusutan barang modal dan tabungan neto. Sedangkan perolehan harta nonfinansial berisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, dan Pembelian Barang Modal Bekas dari LN dan Harta Tak Berwujud Neto (PBHTN). Kesemua rincian tersebut berasal dari sektor real yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional, dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus), sebaliknya jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Melalui matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian di bawah.

Sebenarnya angka pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial, begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial.

Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan dalam baris selisih statistik. Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Kalau pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, cadangan asuransi dan dana pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor asuransi dan dana pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak, yang hanya menggambarkan hubungan hutang dan piutang pajak antara sektor pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan ini yang diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi NAD Indonesia dapat dibagi ke dalam (a) cadangan valuta asing pemerintah, (b) klaim dalam valuta asing lainnya, (c) uang dan simpanan, (d) surat berharga jangka pendek, (e) pinjaman, (f) modal (*equity*), surat berharga jangka panjang dan (g) lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas.

Cadangan valuta asing pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor otoritas moneter dengan sektor luar negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi emas moneter, *Special Drawing Right* (SDR), posisi cadangan di IMF, cadangan valuta asing, dan lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping otoritas moneter, sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor luar negeri. Oleh karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian, dimunculkan kategori klaim dalam valuta asing lainnya.

Di bawah kategori uang dan simpanan dirinci semua instrumen yang sebagian besar berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor lainnya di sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori uang dan simpanan dalam valuta asing dan rupiah secara terpisah. Masing-masing

kategori ini dirinci lagi ke dalam uang kertas dan logam, giro, tabungan dan deposito berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya, yang mencakup tabungan giro pos dan koperasi, berturut-turut untuk menampung simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi.

Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, otoritas moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya pinjaman merupakan hutang pada bank dan institusi lain.

Dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan nonbank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Kesemua kredit atau pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen kredit bank dalam rupiah, pinjaman institusi lain dalam rupiah, serta pinjaman dalam valuta asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit baik yang berasal dari bank maupun institusi lainnya dipecah menjadi kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori pinjaman dalam valuta asing.

Setiap sektor untuk menjalankan kegiatannya sudah tentu mempunyai modal atau *equity*. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara melakukan penawaran sahamnya (*go public*) di pasar modal khususnya untuk perusahaan-perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan (emiten) cara seperti ini merupakan cara memperoleh sumber dana di luar kredit perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana cara seperti ini merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas tersebut, maka dalam NAD, di bawah kategori modal, juga dimunculkan jenis kategori transaksi modal saham dan penyertaan (swasta) dan penyertaan modal pemerintah, yang

dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi perusahaan yang menerimanya.

Surat berharga jangka panjang (obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor pemerintah, lembaga keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Bagian dari kategori ini untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan obligasi pemerintah dan obligasi lainnya tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Saat ini obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri juga telah menerbitkan obligasi untuk dalam negeri, seperti: Surat Utang Negara (SUN), dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti cadangan asuransi dan pensiun, untuk sektor asuransi dan dana pensiun, dan dana perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "*trust company*". Nampaknya investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia. Kemudian untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori kredit dagang. Kategori pajak dimaksudkan untuk menampung hutang-piutang pajak antara pemerintah dengan sektor lainnya. Kategori klaim antar bank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antar BPUG dengan Bank Indonesia, maupun transaksi antar BPUG.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula suatu kategori rupa-rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun demikian, berkaitan dengan data NAD yang disajikan dalam publikasi ini, hanya kategori transaksi yang penting dan strategis saja yang dimunculkan tersendiri, sedangkan untuk kategori transaksi lain hanya dimunculkan agregasinya.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia umumnya merupakan neraca akhir tahun (*Balance Sheet*) perusahaan. Sesuai dengan pembagian sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan kode-kode transaksi NAD, sebaliknya sektor keuangan bukan bank dan sektor bukan keuangan sebagian besar masih merupakan neraca individu perusahaan yang memerlukan

pengolahan lebih lanjut. Sektor rumah tangga dan luar negeri karena karakteristik data yang digunakan berbeda, tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun.

Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci sehingga memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula dengan perkiraan alokasinya (*counterpart accounts*) ke sektor-sektor lain. Dengan demikian sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi ini juga sangat memadai sehingga memungkinkan membuat perkiraan alokasinya ke sektor-sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis kegiatan yang dicakup di dalamnya. Seperti data perusahaan pembiayaan diperoleh dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan bersangkutan. Data Dana Pensiun diperoleh dari Departemen Keuangan dan dari survei-survei khusus. Survei khusus yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data perusahaan pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (SKDLP). Data untuk sektor asuransi (meliputi tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asuransi sosial), diperoleh dari Departemen Keuangan berupa neraca individu sehingga perlu pengolahan lebih lanjut. Sedangkan data untuk Perum Pegadaian,⁷ diperoleh langsung dari perusahaan bersangkutan.

⁷ Sejak April 1990, perusahaan ini berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum).

3.2.4 Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan sektor-sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam bentuk neraca. Untuk keperluan penyusunan NAD diupayakan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, karena keterbatasan data hal yang serupa tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya, terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Khusus mengenai data tabungan dan pembentukan modal pemerintah, diperoleh langsung dari hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 Perusahaan Pemerintah

Perusahaan pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG. Perusahaan pemerintah di bidang keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank sudah termasuk dalam kelompok sektor keuangan sebelumnya. BULOG, walaupun sebenarnya bukan merupakan perusahaan pemerintah tetapi untuk kepentingan penyajian, digabungkan dalam kelompok ini.

Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Departemen Keuangan berupa neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun demikian, data yang diperoleh belum mencakup seluruh BUMN yang ada, sehingga masih diperlukan penaksiran-penaksiran. Data untuk BUMD juga diperoleh dari Departemen Keuangan, dengan cakupan yang masih kurang memadai. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik dilakukan secara tidak langsung melalui alokasi (*counterpart accounts*) sektor-sektor lain. Sementara itu, data untuk BULOG berupa neraca akhir tahun yang cukup rinci diperoleh langsung dari lembaga bersangkutan.

3.2.6 Perusahaan Swasta

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD dan lembaga keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di Indonesia, dalam arti belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan menyajikan statistik keuangannya. Oleh karena itu keberadaan sektor ini dalam NAD Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti.

Satu-satunya sumber data keuangan untuk sektor ini adalah dari Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan, yang mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak.

Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka dari data perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan keseluruhan cakupannya. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambilkan dari perkiraan-perkiraan lawan (*counterpart accounts*) yang tersedia di sektor lain (khususnya sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran struktur finansialnya. Untuk melengkapi gambaran sektor perusahaan swasta, dikumpulkan dan diolah pula neraca-neraca perusahaan yang *go-public*, yang diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

3.2.7 Koperasi

Sektor koperasi terdiri dari koperasi pedesaan (KUD) dan koperasi perkotaan (non-KUD). Data untuk penyusunan NAD sektor ini diperoleh dari beberapa sumber. Untuk Induk Koperasi baik yang berkaitan dengan KUD maupun non-KUD diperoleh dari Departemen Koperasi. Data untuk KUD diperoleh dari hasil perkiraan Departemen Koperasi. Sedangkan data non-KUD diperoleh dari estimasi hasil survei khusus terhadap 1500 koperasi.

Dalam publikasi NAD Indonesia, untuk memudahkan penyajian, sektor koperasi ini dikelompokkan dengan perusahaan swasta. Matriks NAD untuk sektor koperasi pada tahun 2006 datanya diharapkan berasal dari hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE 06). Tetapi sampai saat ini hasil pengolahan SE 06 belum dapat disajikan, sehingga matriks NAD untuk sektor perusahaan swasta untuk tahun 2006 belum mencakup sektor koperasi.

3.2.8 Rumah Tangga

Sektor rumah tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun neraca akhir tahunnya, sebab dengan alasan ekonomi belum terlihat pentingnya rumah tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak 10.000 rumah tangga.

Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio tabungan terhadap pendapatan (*saving ratio*) dan struktur perubahan harta dan kewajiban finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti: uang, giro, deposito, kredit bank dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi (*counterpart accounts*) yang diberikan oleh sektor bank. Data tabungan dan pembentukan modal diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.9 Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia data untuk sektor luar negeri diperoleh dari beberapa sumber dengan cara tidak langsung (sebagai *counterpart accounts*). Data tersebut diturunkan dari hasil perhitungan NAD untuk sektor otoritas moneter, bank dan pemerintah. Di samping itu, dipertimbangkan juga data yang berkaitan dengan transaksi luar negeri yang ada pada neraca pembayaran (*Balance of Payment*).

Tabungan sektor ini sama dengan surplus berjalan yang diperoleh dari Neraca Luar Negeri, Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor rumah tangga dan luar negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (a) neraca konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca asuransi yang dikerjakan oleh Departemen Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Penyusunan Bagan Transaksi (*Chart of Accounts*) Sektoral

Bagan transaksi adalah suatu media antara, yang secara teknis digunakan untuk mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun baik berdasarkan neraca dalam bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transaksi NAD dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan sering dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai berikut.

- i. Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transaksi NAD yang sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD disebut Bagan Transaksi Perusahaan. Selanjutnya bagan transaksi ini dapat disederhanakan dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode kategori transaksi sama.
- ii. Bagan Transaksi Sektoral diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi Perusahaan, yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakai untuk menyusun NAD.

3.3.2 *Penghitungan Arus Finansial*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktek, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) tahun yang berurutan. Oleh karena itu arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif.

Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan dalam dua kolom, sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

3.3.3 *Rekonsiliasi NAD*

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Karena Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk

arus uang dan rekening giro sebagai sumber di BPUG, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasional, rekonsiliasi NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isian kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor harus memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.
 - Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap atau Perolehan Harta Nonfinansial (0200).
 - Investasi Finansial Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah Sumber Finansial (0700).
 - Selisih Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investasi Finansial Neto (0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali, maka selisih statistik ditiadakan, Sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.
 - Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan dana dari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.
 - Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari berbagai instrumen finansial di kolom sumber.
- ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus dijaga. Secara nasional, data penyusutan barang modal, tabungan neto, pembentukan modal tetap dan perubahan stok yang diperoleh dari hasil perhitungan NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan angka-angka PDB. Dalam praktek, penyesuaian dilakukan dengan mengalokasikan perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas kepada sektor-sektor yang tingkat

ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya hasil perhitungan dari sektor-sektor yang tingkat ketelitiannya tinggi tetap dipertahankan.

- iii. Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat perhatian. Instrumen finansial seperti uang, giro, deposito, kredit dagang, dan kredit bank mempunyai karakteristik yang berbeda. Beberapa instrumen dapat ditransaksikan oleh sektor-sektor yang lebih terbatas. Sebagai contoh giro (1022), di sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia tidak mengalami penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin saja diubah untuk menjaga keseimbangan dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Data tersebut umumnya dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah sering terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai, bahkan disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode.

Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Kalau sistem ini dapat berjalan maka proses penyusunan dapat dipersingkat dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

BAB IV

ANALISIS DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas perkembangan beberapa variabel penting yang diturunkan dari matriks Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2002-2007. Pembahasan akan difokuskan pada neraca pembiayaan modal masing-masing sektor serta tinjauan NAD untuk periode tersebut. Pada bagian lain, diberikan analisis yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana untuk sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tahun 2007 serta ulasan mengenai *Financial Deepening* dan *Velocity of Income*.

4.1 Neraca Pembiayaan Sektoral

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaku ekonomi terdiri dari berbagai sektor/institusi yaitu bank, bukan bank, pemerintah, rumah tangga, perusahaan pemerintah, swasta dan luar negeri. Penyajian untuk setiap sektor dalam matriks NAD dibagi menjadi dua kolom yaitu sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial. Melalui neraca pembiayaan modal sektoral tersebut dapat dilihat berbagai sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh setiap sektor dalam perekonomian. Pada tabel 4.1 dan 4.2 disajikan sumbangan tabungan bruto (tabungan neto ditambah penyusutan barang modal) menurut sektor terhadap total tabungan bruto dan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan tabel 4.3 dan 4.4 menyajikan struktur investasi non-finansial (pembentukan modal tetap bruto) terhadap total investasi non-finansial dan terhadap PDB. Kemudian pada tabel 4.5 diperlihatkan struktur pembentukan pinjaman neto, yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi nonfinansial menurut sektor.

4.1.1 Tabungan Bruto menurut Sektor

Pada tabel 4.1 berikut ini menunjukkan struktur tabungan bruto selama periode 2002-2007 yang terbagi atas tiga sektor; sektor pertama adalah sektor bukan keuangan dengan sub sektornya yaitu pemerintah, perusahaan dan rumah tangga; sektor berikutnya adalah sektor keuangan dengan dua sub sektornya yaitu bank dan bukan bank; dan sektor terakhir adalah sektor luar negeri.

Sejak kurun waktu 2002-2007, jumlah tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 21,11 persen.

**TABEL 4.1. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR
TAHUN 2002-2007 (persen)**

SEKTOR	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	113,89	95,50	91,55	99,80	98,20	97,38
1 Pemerintah	19,75	20,37	18,44	14,73	21,36	18,20
2 Perusahaan	66,45	53,96	48,01	59,11	55,59	54,65
2.1 Pemerintah	20,74	10,31	15,20	0,52	0,44	4,13
2.2 Swasta ⁺⁾	45,72	43,65	32,81	58,59	55,15	50,53
3 Rumah Tangga	27,68	21,17	25,10	25,96	21,26	24,53
B. KEUANGAN	1,54	18,15	13,41	9,94	6,33	2,91
4 Bank ⁺⁺⁾	0,95	17,96	12,78	8,48	5,29	0,94
5 Bukan Bank	0,59	0,19	0,63	1,46	1,04	1,97
C. LUAR NEGERI	-15,43	-13,65	-4,96		-4,54	-0,29
6 Luar Negeri	-15,43	-13,65	-4,96	-9,74	-4,54	-0,29
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Tab Bruto (Miliar Rp)	389 947	515 470	552 292	738.726	847 853	984 001

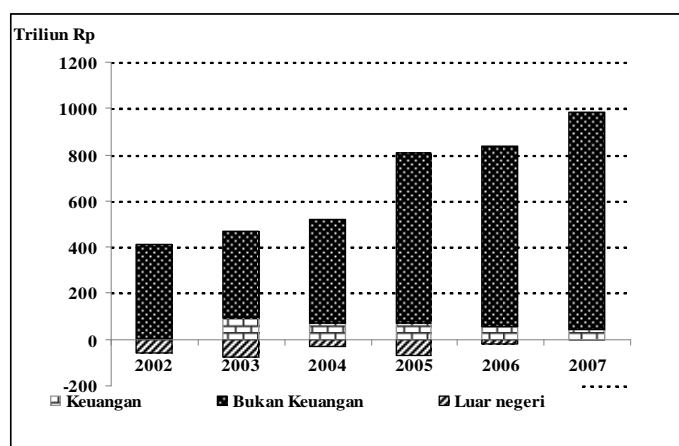
*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk OM

Pada tahun-tahun berikutnya tabungan bruto terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 25,47 persen menjadi sebesar Rp 492.849 miliar pada tahun 2004, dan meningkat sebesar 49.89 persen menjadi sebesar Rp 738.739 miliar pada tahun 2005 yang menunjukkan peningkatan tertinggi pada periode 2002-2007. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2006 dan 2007 dengan total nilai tabungan bruto yang terbentuk sebesar Rp 819.635 miliar dan Rp 984.099 miliar walaupun sempat terjadi perlambatan peningkatan pada tahun 2006 yaitu 10,97 persen yang kemudian kembali meningkat pada tahun 2007 sebesar 20,07 persen.



Gambar 4.1 Perkembangan Tabungan Bruto Tahun 2002-2007

Selama periode 2002-2007 sektor bukan keuangan memiliki peranan yang dominan dalam pembentukan tabungan bruto dibandingkan sektor keuangan maupun sektor luar negeri. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 4.1 Dalam kurun waktu tersebut peranan sektor bukan keuangan relatif berfluktuasi. Peranan sektor bukan keuangan yang terdiri dari sub sektor pemerintah, sub sektor perusahaan (perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta) dan sub sektor rumah tangga.

Peranan sektor bukan keuangan dalam pembentukan tabungan bruto mencapai persentase tertinggi pada tahun 2002, yaitu sebesar 115,30 persen terhadap total tabungan bruto. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2002 kondisi perekonomian Indonesia relatif stabil dan terkendali serta prospek pemulihan perekonomian pasca krisis yang semakin baik. Sedangkan peranan sektor bukan keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto yang terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 90,53 persen dari total pembentukan tabungan bruto. Kondisi tersebut dikarenakan adanya gejolak politik (pemilihan presiden) yang berdampak pada stabilitas perekonomian. Pada tahun 2007 peranan sektor bukan keuangan sebesar 95,65 persen terhadap tabungan bruto.

Jika dilihat per sektor maka pada sektor bukan keuangan, peranan sektor pemerintah relatif berfluktuatif dalam pembentukan tabungan bruto. Pada tahun 2002 peranan sektor pemerintah terhadap pembentukan tabungan bruto sebesar 21,76 persen. Pada tahun 2003, peranan sektor ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 26,73 persen. Kenaikan peranan sektor pemerintah dalam pembentukan tabungan bruto selama tahun 2002 hingga 2003 disebabkan oleh upaya-upaya pemerintah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak (WP) sehingga pendapatan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan. Selain itu adanya kebijakan untuk menurunkan subsidi dan pengurangan beban bunga utang dalam negeri melalui kebijakan *buy back* yang dilakukan pemerintah mampu mengurangi beban belanja negara.

Memasuki tahun 2004 mengalami penurunan menjadi sebesar 20,67 persen, dan terus menurun hingga menjadi sebesar 14,73 persen pada tahun 2005. Penurunan tersebut disebabkan karena besarnya tekanan peningkatan belanja negara sebagai dampak dari tingginya harga minyak dunia sejak tahun 2004 yang mengakibatkan kenaikan subsidi BBM oleh pemerintah serta berbagai kejadian bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu tersebut sehingga meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk merestrukturisasi daerah-daerah yang terkena bencana. Pada tahun 2006, peranan sektor pemerintah dalam pembentukan tabungan bruto kembali mengalami peningkatan menjadi 22,09 persen.

Meskipun secara umum kondisi perekonomian di tahun 2006 relatif belum stabil pasca kenaikan BBM di tahun 2005 yang mencapai rata-rata 126 persen, akan tetapi pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan tetap yang berasal dari penerimaan pajak maupun non-pajak serta peningkatan hibah. Pada tahun 2007, sektor pemerintah mengalami penurunan menjadi 18,20 persen yang disebabkan karena percepatan pembayaran utang ke IMF.

Peranan sub sektor bukan keuangan yang lain, yaitu perusahaan yang terdiri dari sub sektor perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta terhadap pembentukan tabungan bruto selama periode 2002-2007 berfluktuasi antara 41–63 persen. Sub sektor perusahaan pada tahun 2002 memberikan andil sebesar 63,04 persen terhadap total pembentukan tabungan bruto. Masing-masing disumbang oleh perusahaan pemerintah sebesar 22,84 persen dan perusahaan swasta sebesar 40,20 persen. Pada tahun 2003, kontribusi subsektor ini mengalami penurunan menjadi 41,12 persen terhadap total pembentukan tabungan bruto, yakni dari perusahaan pemerintah sebesar 13,53 persen dan perusahaan swasta sebesar 27,60 persen. Pada tahun 2004 peranan subsektor perusahaan terhadap pembentukan total tabungan bruto relatif stabil, yaitu 41,74 persen. Dengan peran perusahaan pemerintah mencapai 17,03 persen dan peranan perusahaan swasta mencapai 24,71 persen.

Peranan subsektor perusahaan terhadap pembentukan tabungan bruto kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,11 persen di tahun 2005. Akan tetapi peningkatan subsektor ini diiringi dengan penurunan peranan perusahaan pemerintah menjadi hanya sebesar 0,52 persen, sedangkan peranan perusahaan swasta meningkat menjadi sebesar 58,59 persen.. Penurunan peranan perusahaan pemerintah yang sangat signifikan ini disebabkan perusahaan pemerintah pada tahun tersebut terjadi privatisasi atau mengalami kerugian. Meningkatnya beban operasional perusahaan akibat naiknya BBM sebesar rata-rata 126% menyebabkan peranan subsektor perusahaan mengalami penurunan menjadi 51,73 persen. Penurunan ini terjadi pada perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, yaitu masing-masing sebesar 0,45 persen dan 51,28 persen. Untuk tahun 2007 sub sektor perusahaan mengalami peningkatan menjadi 59,42 persen yang disumbangkan oleh perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta masing-masing sebesar 4,13 persen dan 55,30 persen. Perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta mengalami peningkatan pada tahun 2007 disebabkan oleh penguatan fundamental ekonomi di dalam negeri.

Peranan sub sektor rumah dalam pembentukan tabungan bruto pada periode tahun 2002-2007 mengalami kecenderungan menurun dari sebesar 30,50 persen pada tahun 2002 hingga menjadi sebesar 18,02 persen pada tahun 2007. Kecenderungan penurunan

mengindikasikan bahwa membaiknya perekonomian pada periode tersebut hanya didorong oleh *booming* sektor finansial.

Selama periode tahun 2002-2007, peranan sektor keuangan yang terdiri dari bank dan bukan bank, terhadap pembentukan tabungan bruto relatif kecil dibandingkan peranan sektor bukan keuangan. Peranan sektor keuangan dalam pembentukan tabungan bruto pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 1,70 persen. Penurunan peranan sektor keuangan didorong oleh penurunan peranan subsektor bank yang mengalami penurunan menjadi sebesar 1,05 persen yang disebabkan oleh masih belum stabilnya kondisi perbankan serta penurunan jumlah bank yang beroperasi. Sedangkan untuk subsektor bukan bank justru mengalami peningkatan peranan menjadi sebesar 0,65 persen. Hal ini secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh belum pulihnya kondisi perbankan nasional sehingga membuka peluang bagi subsektor bukan bank sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat. Pada tahun 2003, peranan sektor keuangan meningkat dengan signifikan menjadi 23,82 persen. Peningkatan peranan sektor ini didorong oleh peningkatan subsektor bank yang mengalami peningkatan menjadi 23,57 persen.

Kenaikan peranan subsektor perbankan ini disebabkan oleh belum pulihnya fungsi intermediasi sektor perbankan sehingga penyaluran kredit masih terhambat. Sedangkan pada tahun ini peranan subsektor bukan bank mengalami penurunan menjadi 0,25 persen. Pada empat tahun selanjutnya peranan sektor keuangan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 4,65 persen pada tahun 2007. Penurunan peranan sektor keuangan pada tahun-tahun tersebut seiring dengan penurunan peranan subsektor bank yang terus mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 2,58 persen pada tahun 2007. Peranan sektor keuangan dalam pembentukan tabungan bruto mengalami penurunan menjadi 4,65 persen. Penurunan peranan subsektor bank terhadap pembentukan tabungan bruto disebabkan selain karena penurunan jumlah bank yang beroperasi juga semakin membaiknya fungsi intermediasi perbankan dimana penyaluran kredit oleh perbankan semakin meningkat. Sedangkan untuk peranan subsektor bukan bank cenderung relatif stabil, yaitu berkisar antara 0,25 persen hingga 2,07 persen.

Struktur tabungan bruto sektor luar negeri selama tahun 2002-2007 selalu mengalami kontraksi (bernilai negatif), yaitu berkisar antara -19,46 persen hingga -0,29 persen. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa pembayaran hutang Indonesia pada pihak luar negeri masih lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Indonesia dari luar negeri. Pada

tahun 2007, peranan sektor luar negeri terhadap pembentukan tabungan bruto mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar -0,29 persen dari total tabungan bruto.

TABEL 4.2. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2002-2007 (dalam persen)

SEKTOR	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	24,38	24,45	20,91	26,57	24,93	24,21
1 Pemerintah	4,23	5,21	4,44	3,92	5,42	4,53
2 Perusahaan	14,22	13,81	10,44	15,74	14,11	13,59
2.1 Pemerintah	4,44	2,64	3,66	0,14	0,11	1,03
2.2 Swasta ⁺⁾	9,79	11,17	6,78	15,60	14,00	12,56
3 Rumah Tangga	5,92	5,42	6,04	6,91	5,40	6,10
B. KEUANGAN	0,33	4,65	3,23	2,65	1,61	0,72
4 Bank ⁺⁺⁾	0,20	4,60	3,07	2,26	1,34	0,23
5 Bukan Bank	0,13	0,05	0,15	0,39	0,26	0,49
C. LUAR NEGERI	-3,30	-3,49	-0,08	-2,59	-1,15	-0,07
6 Luar Negeri	-3,30	-3,49	-0,08	-2,59	-1,15	-0,07
A. BUKAN KEUANGAN						
TOTAL	21,40	25,60	24,06	26,63	25,39	24,86
Produk Domestik Bruto / PDB	1 821 833	2 013 675	2 295 826	2 774 281	3 339 480	3 957 404
(Miliar Rp)						

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

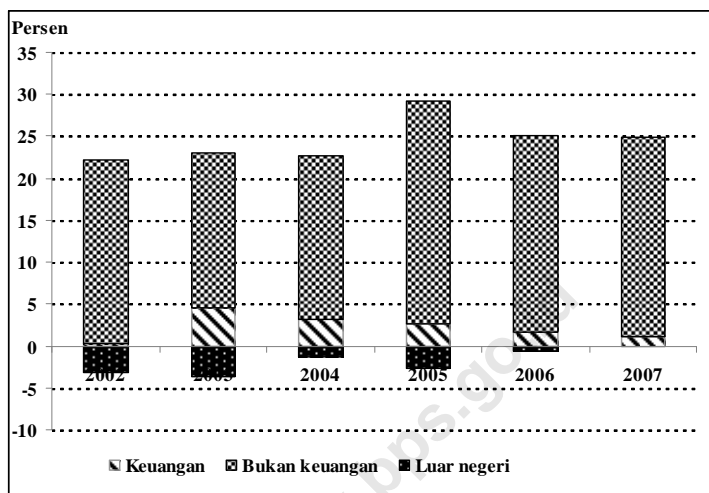
+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk OM

Selanjutnya pada Tabel 4.2 diatas, memperlihatkan peranan tabungan bruto yang berasal dari sektor bukan keuangan, sektor keuangan dan sektor luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara keseluruhan peranan tabungan bruto terhadap PDB cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 26,53 persen pada tahun 2005, yang kemudian diikuti dengan sedikit menurun menjadi 24,55 persen pada tahun 2006. Pada tahun 2007, peranan tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto kembali meningkat menjadi 24,87 persen. Kenaikan ini disebabkan perkembangan perekonomian Indonesia yang membaik sepanjang tahun 2007.

Peranan tabungan bruto sektor bukan keuangan terhadap PDB selama periode 2002-2007 paling dominan dibandingkan dengan sektor keuangan dan sektor luar negeri, hal tersebut dapat terlihat pada gambar 4.4 yang menunjukkan tingginya peran dari tabungan bruto sektor bukan keuangan. Jika dilihat per sektor bukan keuangan, peranan tabungan bruto sektor pemerintah terhadap PDB dalam periode 2002-2007 cukup berfluktuatif, kontribusi

terkecil sektor ini terhadap PDB terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 4,13 persen. Hal ini disebabkan kondisi keuangan pemerintah pada tahun 2002 masih mendapat tekanan yang cukup berat, yaitu memburuknya lingkungan makroekonomi, tidak optimalnya beberapa kebijakan fiskal, dan ada pembatalan sebagian rencana pencairan pinjaman program sebagai pendukung pembiayaan pembangunan. Sedangkan kontribusi terbesarnya sebesar 5,42 persen terjadi pada tahun 2006, yang disebabkan karena meningkatnya Pendapatan Negara dan hibah didukung dengan perkembangan penerimaan nonpajak



Gambar 4.2 Struktur Tabungan Bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2002-2007

Peranan tabungan bruto sektor perusahaan terhadap PDB selama periode 2002-2007 paling dominan dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Pada tahun 2002, peranan tabungan bruto sektor ini sebesar 11,98 yang didorong oleh sub sektor perusahaan swasta yang memberikan andil sebesar 7,64 persen. Bahkan pada tahun 2005 peranan tabungan bruto sektor perusahaan dalam pembentukan PDB meningkat menjadi 15,68 persen, paling tinggi selama periode 2002-2007. Peningkatan yang cukup signifikan ini didorong oleh peranan sub sektor perusahaan pemerintah sebesar 0,14 persen dan sub sektor perusahaan swasta sebesar 15,54 persen. Namun pada tahun 2006, peranan sektor ini terhadap PDB menurun menjadi 12,70 persen, yang didorong oleh penurunan sub sektor perusahaan pemerintah sebesar 0,11 persen dan sub sektor perusahaan swasta sebesar 12,59 persen. Pada tahun 2007, peranan ini kembali meningkat menjadi 24,87 yang didorong oleh peningkatan sub sektor perusahaan pemerintah sebesar 1,03 persen dan peningkatan sub sektor perusahaan swasta sebesar 13,75 persen. Selama keseluruhan periode tersebut, peranan tabungan bruto sub sektor perusahaan swasta dalam pembentukan PDB selalu lebih besar dibandingkan peranan sub sektor perusahaan pemerintah.

Peranan tabungan bruto sub sektor rumah tangga terhadap PDB dalam kurun waktu 2002-2007 relatif stabil, yaitu berada pada kisaran 4,48 persen hingga 6,89 persen, relatif lebih kecil dibandingkan dengan peranan sub sektor perusahaan dan relatif lebih besar dibandingkan dengan peranan sub sektor pemerintah. Peranan tabungan bruto sub sektor ini pada tahun 2007 sebesar 4,48 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kondisi perekonomian global dan domestik yang kurang menguntungkan serta masih belum pulihnya daya beli masyarakat pasca kenaikan harga BBM.

Secara keseluruhan peranan tabungan bruto sektor bukan keuangan yang terdiri atas sub sektor pemerintah, sub sektor perusahaan dan sub sektor rumah tangga terhadap PDB dalam kurun waktu 2002-2007 cenderung berfluktuatif. Peranan tabungan bruto sektor bukan keuangan yang terendah sebesar 18,45 persen terjadi pada tahun 2003 dan yang tertinggi sebesar 26,47 persen terjadi pada tahun 2005.

Peranan tabungan bruto sektor keuangan terhadap pembentukan PDB selama periode 2002-2007 berada pada kisaran 0,32 persen hingga 4,59 persen. Jika dilihat per sub sektor, maka peranan sub sektor bank terhadap pembentukan PDB selama periode tersebut relatif lebih besar dibandingkan peranan sub sektor bukan bank. Pada tahun 2003 peranan tabungan bruto sektor bank sebesar 4,55 persen terhadap total PDB, ini merupakan peranan terbesar selama periode tersebut, sementara pada periode yang sama, peranan tabungan bruto sektor bukan bank terhadap total PDB hanya sebesar 0,05 persen.

Struktur tabungan bruto sektor luar negeri terhadap PDB selama kurun waktu 2002-2007 selalu bernilai negatif. Pada tahun 2003, peranan tabungan bruto sektor luar negeri terhadap pembentukan PDB mengalami kontraksi sebesar -3,75 persen, paling tinggi dibandingkan periode yang lainnya. Sedangkan pada tahun 2007, peranan tabungan bruto sektor ini terhadap PDB mengalami kontraksi paling kecil, yaitu hanya sebesar -0,07 persen.

4.1.2 Investasi Non-Finansial Menurut Sektor

Investasi nonfinansial yang dirinci menurut sektor bukan keuangan, sektor keuangan dan luar negeri disajikan pada tabel 4.3. Kontribusi investasi nonfinansial sektor bukan keuangan selama periode 2002-2007 paling dominan dibandingkan dengan sektor keuangan. Selama periode tersebut sektor bukan keuangan memberikan kontribusi rata-rata 99,06 persen terhadap total investasi nonfinansial. Kontribusi sektor bukan keuangan terhadap investasi nonfinansial pada tahun 2003 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**TABEL 4.3. STRUKTUR INVESTASI NON-FINANSIAL MENURUT SEKTOR
TAHUN 2002- 2007 (persen)**

SEKTOR	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	99,21	98,24	99,41	99,20	99,45	99,66
1 Pemerintah	15,90	16,02	13,84	12,21	13,41	12,59
2 Perusahaan	68,28	77,63	72,11	82,46	82,33	70,63
2.1 Pemerintah	30,48	16,03	26,73	9,54	9,20	7,67
2.2 Swasta ⁺⁾	37,80	61,60	45,38	72,93	73,13	62,95
3 Rumah Tangga	15,03	4,59	13,46	4,52	3,71	16,44
B. KEUANGAN	0,79	1,76	0,59	0,80	0,55	0,34
4 Bank ⁺⁺⁾	0,63	1,56	0,53	0,66	0,37	0,32
5 Bukan Bank	0,17	0,21	0,06	0,14	0,18	0,02
C. LUAR NEGERI						
6 Luar Negeri						
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Tab Bruto (Miliar Rp)	389 947	392 789	552 292	738 726	847 853	984 001

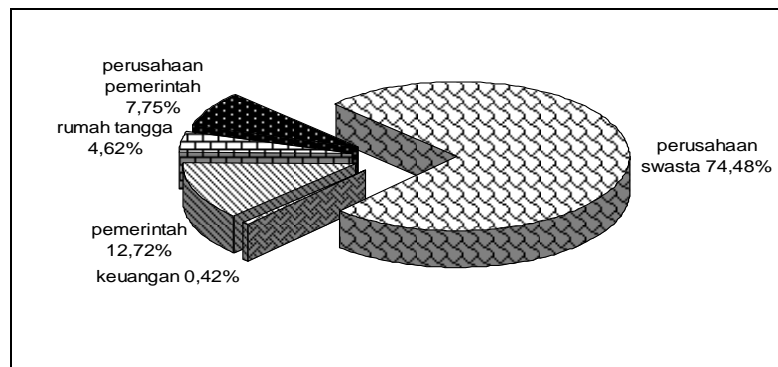
*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk OM

Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh menurunnya peranan investasi di sektor perusahaan pemerintah dan rumah tangga pada periode tersebut yakni sebesar 21,04 persen dan 6,02 persen. Sebaliknya, pada tahun 2004 kontribusi sektor ini mengalami penungkatan yang cukup signifikan menjadi 99,34 persen. Peningkatan ini masih dipicu oleh sektor perusahaan pemerintah dan rumah tangga yang meningkat pesat. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak terulang kembali pada tahun 2005. Pada periode ini, sektor bukan keuangan mengalami sedikit penurunan menjadi 99,20 persen yang disebabkan menurunnya kontribusi sektor pemerintah dan sektor perusahaan pemerintah yang juga dibarengi oleh penurunan sektor rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 2006, kontribusi sektor bukan keuangan kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 99,43 persen atau meningkat sekitar 0,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya kontribusi dari sektor pemerintah. Sehingga, kenaikan tersebut berhasil mendorong sektor bukan keuangan untuk kembali meningkat di tahun 2007 meskipun tidak terlalu besar. Pada tahun 2007, sektor bukan keuangan memberikan kontribusi sebesar 99,58 persen untuk investasi non finansial atau meningkat 0,15 persen dari tahun 2006. Bedanya, pada periode ini, kenaikan justru dipicu oleh peningkatan sektor perusahaan swasta yang biasanya berbanding terbalik dengan peningkatan kontribusi sektor bukan keuangan tiap periodenya.



Gambar 4.3 Struktur investasi non-finansial menurut sektor tahun 2007

Dari gambar 4.3. di atas, dapat dilihat bahwa struktur investasi non-finansial pada tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bedanya, pada periode ini, kontribusi sektor perusahaan pemerintah terhadap total investasi non-finansial jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor pemerintah. Hal ini sedikit banyaknya mendapat pengaruh tidak langsung dari gencarnya privatisasi BUMN yang mulai marak tahun 2005. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sektor perusahaan swasta masih menjadi kontributor utama investasi non finansial, sedangkan sektor keuangan tetap merupakan sektor dengan kontribusi terkecil untuk investasi non finansial.

Selama periode 2002 - 2007 kontribusi investasi sektor pemerintah terhadap struktur investasi nonfinansial sangat berfluktuasi. Pada tahun 2003 kontribusi sektor ini sebesar 21,02 persen, lebih besar dibandingkan tahun 2002 yang kontribusinya hanya sebesar 17,51. Namun pada tahun 2004 hingga 2005 kontribusi sektor ini terhadap pembentukan investasi nonfinansial terus mengalami penurunan masing-masing menjadi 15,51 persen dan 12,21 persen. Pada tahun 2006 kontribusi sektor ini mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen dibandingkan tahun 2005 menjadi 13,87 persen. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah tabungan yang dimiliki sektor ini dan kondisi perekonomian yang relatif stabil sehingga sektor ini dapat melakukan investasi fisik. Namun, kontribusi sektor pemerintah turun kembali menjadi 12,72 persen pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pemerintah hanya menjadi stabilisator bagi struktur investasi non finansial, sehingga kontribusinya cukup fluktuatif tetapi masih dalam rentang yang tidak terlalu jauh.

Dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor lain dalam pembentukan investasi nonfinansial, sektor perusahaan yang terdiri dari perusahaan pemerintah dan swasta mempunyai kontribusi paling tinggi, yaitu berkisar antara 65 - 82 persen. Pada tahun 2002 investasi nonfinansial sektor ini memberikan kontribusi sebesar 65,05 persen terhadap total investasi nonfinansial. Kondisi sosial politik yang semakin stabil pada tahun 2003 serta sikap

masyarakat yang mulai dewasa dalam menanggapi suatu peristiwa seperti meledaknya bom di beberapa tempat telah membuat persepsi dunia terhadap Indonesia mulai membaik. Hal tersebut mampu mendongkrak kontribusi sektor perusahaan terhadap pembentukan investasi nonfinansial yang meningkat menjadi sebesar 70,65 persen. Namun karena belum selesainya berbagai permasalahan hukum, perburuhan dan UMR secara adil pada tahun 2004 mengakibatkan kontribusi investasi sektor perusahaan turun menjadi sebesar 68,75 persen. Iklim investasi yang semakin kondusif dan perekonomian yang relatif stabil telah mengakibatkan kontribusi investasi nonfinansial sektor perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2005 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 82,46 persen atau meningkat sekitar 20 persen. Peningkatan yang cukup besar ini didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perusahaan swasta. Namun pada tahun 2006 kontribusi sektor perusahaan sedikit menurun menjadi 81,72 persen. Penurunan ini didorong oleh menurunnya jumlah tabungan bruto yang dimiliki oleh sektor ini dan semakin diminatinya investasi finansial yang menjanjikan return yang lebih baik dan resiko yang relatif kecil. Kondisi yang hampir sama terulang pada tahun 2007, di mana kontribusi sektor perusahaan kembali menurun menjadi 81,38 persen, meskipun penurunannya masih dalam batas kewajaran. Kontribusi sektor perusahaan yang sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 mampu menembus angka 80 persen cukup menggambarkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah semakin stabil dan kondusif, sehingga perusahaan mulai yakin untuk menanamkan modal non finansialnya di negara ini.

Kontribusi investasi sektor perusahaan pemerintah terhadap total investasi nonfinansial dalam rentang waktu 2002 – 2007 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2002 – 2003 kontribusinya terhadap pembentukan investasi nonfinansial secara nasional cenderung menurun dari 33,57 persen menjadi 21,04 persen. Seiring dengan membaiknya iklim investasi di Indonesia pada tahun 2004, maka kontribusi investasi sektor perusahaan pemerintah terhadap total investasi nonfinansial kembali meningkat menjadi 29,95 persen. Tetapi pada tahun 2005 – 2007 kontribusi investasi sektor perusahaan pemerintah terus mengalami penurunan yang cukup besar yaitu berturut-turut 9,54, 9,52 persen, dan 7,67.

Tidak jauh berbeda dengan sektor perusahaan pemerintah, kontribusi investasi nonfinansial sektor perusahaan swasta dalam kurun waktu 2002 – 2007 juga sangat berfluktuasi. Kontribusi sektor ini pada tahun 2002 sebesar 31,48 persen, kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 49,60 persen dan kembali turun pada tahun 2004 menjadi 38,80 persen. Pada tahun 2005 kontribusi investasi sektor perusahaan swasta dalam

pembentukan investasi nonfinansial meningkat tajam mencapai angka sebesar 72,93 persen. Hal ini didorong oleh kondisi di sosial politik yang stabil sehingga investasi di sektor riil atau investasi nonfinansial kembali diminati. Peningkatan yang cukup tinggi ini tidak diikuti pada tahun 2006 karena kontribusi sektor ini kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 72,20 persen hingga akhirnya meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 74,48 persen. Pada tabel 4.3 juga ditunjukkan bahwa selama periode 2002–2005 kontribusi investasi perusahaan swasta berbanding terbalik dengan perkembangan investasi perusahaan pemerintah. Kenaikan maupun penurunan kontribusi investasi sektor perusahaan pemerintah pada periode tersebut juga diikuti oleh penurunan maupun kenaikan kontribusi investasi perusahaan swasta. Hal ini tidak berlaku pada tahun 2006 karena kontribusi investasi perusahaan swasta dan investasi perusahaan pemerintah sama-sama mengalami penurunan. Dapat kita lihat lagi bahwa selama periode 2002–2006, perubahan investasi non finansial untuk sektor bukan keuangan berbanding terbalik dengan perubahan investasi sektor perusahaan swasta. Kenaikan investasi sektor perusahaan swasta menyebabkan penurunan investasi untuk sektor bukan keuangan, begitu pula sebaliknya. Bila hal ini berlanjut, tentu bisa menjadi rambu bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati menentukan kebijakan dalam menggerakkan kegiatan investasi di sektor riil agar mampu menjaga kestabilan kegiatan investasi di sektor bukan keuangan. Perlu dicermati juga perubahan kontribusi sektor perusahaan pemerintah yang selama tahun 2005 sampai tahun 2007 berubah dari dua digit dalam persentasenya, menjadi hanya satu digit dalam persentasenya, bahkan terus menurun. Sementara itu, untuk periode yang sama, kontribusi sektor perusahaan swasta justru meningkat hingga mencapai level 70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perusahaan swasta perlahan tapi pasti mulai menguasai permainan investasi non finansial di Indonesia.

Struktur investasi nonfinansial sektor rumah tangga mencapai 16,56 persen pada tahun 2002. Kemudian, pada tahun 2003 kontribusi sektor ini terhadap pembentukan investasi nonfinansial di Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu lebih dari 10 persen menjadi sebesar 6,02 persen dan akhirnya meningkat lagi. Pada tahun 2005 kembali terjadi penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya menjadi 4,52 persen. Penurunan ini terus berlanjut di tahun 2006, di mana kontribusi investasi nonfinansial sektor rumah tangga menjadi 3,83 persen. Penurunan kontribusi sektor ini berturut-turut didorong oleh ekspektasi kenaikan harga dan daya beli yang menurun sehingga dana yang dimiliki oleh sektor ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi ataupun digerakkan melalui investasi finansial daripada digunakan untuk melakukan pembentukan investasi fisik. Bahkan, pada tahun 2007, meskipun

terjadi kenaikan kontribusi sektor rumah tangga menjadi 4,62 persen, tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor rumah tangga untuk investasi non finansial sudah cukup kecil dibandingkan 3 atau 5 periode sebelumnya.

Selain sektor bukan keuangan, sektor keuangan juga berperan dalam pembentukan investasi nonfinansial. Dalam rentang waktu 2002 - 2007 sektor keuangan memberikan kontribusi investasi nonfinansial yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor bukan keuangan. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi investasi sektor keuangan dalam pembentukan investasi nonfinansial hanya berkisar antara 0,42 persen hingga 2,32 persen. Pada tahun 2002 kontribusi investasi sektor keuangan sebesar 0,87 persen, yang berasal dari sektor bank dan bukan bank masing-masing sebesar 0,69 persen dan 0,18 persen.

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 2,32 persen yang disumbang oleh sektor bank sebesar 2,04 persen dan bukan bank 0,27 persen. Sementara pada tahun 2004 kontribusi sektor keuangan terhadap pembentukan investasi nonfinansial hanya 0,66 persen, menurun tajam jika dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2005 kontribusi investasi sektor keuangan mengalami sedikit perbaikan menjadi 0,80 persen. Hal ini didorong oleh kontribusi sektor bank sebesar 0,66 persen dan sektor bukan bank 0,14 persen. Namun, investasi sektor keuangan turun kembali menjadi 0,57 persen pada tahun 2006 yang diakibatkan penurunan kontribusi sektor perbankan yang hanya menyumbang 0,35 persen walaupun kontribusi sektor keuangan bukan bank meningkat menjadi 0,19 persen. Kontribusi investasi sektor keuangan tahun 2007 merupakan yang paling kecil sepanjang periode 2002 – 2007 yaitu sebesar 0,42 persen yang disumbang oleh sektor bank sebesar 0,10 persen dan bukan bank sebesar 0,32 persen. Turunnya kontribusi sektor ini karena semakin menariknya investasi finansial dalam hal return maupun resiko sehingga sebagian besar kelebihan likuiditas di sektor ini digunakan melalui instrumen pasar finansial seperti obligasi pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia.

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat struktur investasi nonfinansial menurut sektor terhadap PDB periode 2002 - 2007. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio investasi nonfinansial dari tahun 2002 sampai tahun 2007 berkisar antara 19 persen hingga 26 persen. Pada tahun 2002 rasio investasi nonfinansial sektor ini terhadap PDB sebesar 19,00 persen dan mulai tahun 2003 hingga 2005 rasio investasi nonfinansial terhadap PDB terus mengalami peningkatan menjadi masing masing sebesar 19,29 persen, 21,68 persen dan 26,53 persen. Namun, tren peningkatan tersebut tidak terulang pada tahun 2006 sehingga rasio investasi nonfinansial terhadap PDB mengalami penurunan menjadi 24,55 persen. Penurunan ini menunjukkan

berkurangnya pembentukan investasi fisik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2007, rasio investasi non finansial terhadap PDB meningkat kembali menjadi 24,61 persen.

TABEL 4.4. STRUKTUR INVESTASI NON-FINANSIAL MENURUT SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2002 - 2007 (persen)

SEKTOR	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	21,23	25,15	23,91	26,41	25,25	24,78
1 Pemerintah	3,40	4,10	3,33	3,25	3,41	3,13
2 Perusahaan	14,61	19,87	17,35	21,96	20,90	17,56
2.1 Pemerintah	6,52	4,10	6,43	2,54	2,34	1,91
2.2 Swasta ⁺⁾	8,09	15,77	10,92	19,42	18,57	15,65
3 Rumah Tangga	3,22	1,17	3,24	1,20	0,94	4,09
B. KEUANGAN	0,17	0,45	0,14	0,21	0,14	0,08
4 Bank ⁺⁺⁾	0,13	0,40	0,13	0,18	0,09	0,08
5 Bukan Bank	0,04	0,05	0,01	0,04	0,05	0,01
C. LUAR NEGERI						
6 Luar Negeri						
TOTAL	21,40	25,60	24,06	26,63	25,39	24,86
Produk Domestik Bruto / PDB	1 821 833	2 013 675	2 295 826	2 774 281	3 339 480	3 957 404
(Miliar Rp)						

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk OM

Sedangkan, rasio investasi nonfinansial sektor bukan keuangan terhadap PDB periode 2003-2005 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 rasio investasi non finansial sektor bukan keuangan terhadap PDB sebesar 18,84 persen atau naik 0,01 persen dari tahun 2002 yaitu sebesar 18,83 persen. Kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi 21,54 persen, dan berlanjut pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 26,31 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006 rasio investasi sektor bukan keuangan terhadap PDB turun menjadi 24,41 persen hingga akhirnya meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 24,50 persen Berdasarkan tabel 4.4 dapat pula dilihat bahwa sektor bukan keuangan mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap pembentukan investasi fisik untuk Produk Domestik Bruto di Indonesia.

Pada tahun 2002 rasio investasi nonfinansial sektor pemerintah terhadap PDB sebesar 3,33 persen dan kemudian pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 4,05 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 rasio investasi non finansial sektor pemerintah

terus menurun menjadi masing-masing sebesar 3,36 persen dan 3,24 persen. Namun pada tahun 2006 rasio investasi nonfinansial sektor ini terhadap PDB meningkat menjadi 3,41 persen. Meningkatnya tabungan yang dimiliki sektor ini sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian melalui pembentukan investasi fisik mendorong naiknya rasio investasi nonfinansial sektor ini terhadap PDB. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak terulang pada tahun 2007. Rasio investasi non finansial terhadap PDB pada tahun 2007 menurun menjadi 3,13 persen.

Selain itu, perkembangan investasi nonfinansial sektor perusahaan memperlihatkan struktur yang searah dengan perkembangan sektor bukan keuangan dan investasi non finansial total. Rasio investasi non finansial sektor perusahaan terhadap PDB yang pada tahun 2002 sebesar 12,36, terus meningkat dari tahun 2003 –masing-masing menjadi 13,63 persen, 14,91 persen dan 21,87 persen. Namun pada tahun 2006 rasio tersebut menurun hingga mencapai 20,06 persen untuk kemudian meningkat lagi menjadi 20,24 persen.

Rasio investasi sektor perusahaan pemerintah terhadap PDB 6,38 persen pada tahun 2002 menurun dan menjadi 4,06 persen pada tahun 2003. Sedangkan rasio investasi sektor perusahaan swasta mengalami peningkatan dari 5,98 persen pada tahun 2002 menjadi 9,57 persen pada tahun 2003. Pada tahun 2004 rasio investasi nonfinansial sektor perusahaan pemerintah naik menjadi 6,49 persen dan kembali menurun menjadi 2,53 persen pada tahun 2005. Penurunan ini terus berlanjut pada periode 2006-2007, di mana rasio investasi non finansial sektor perusahaan pemerintah terus berkurang menjadi 2,34 persen pada tahun 2006 dan 1,91 persen pada tahun 2007. Sebaliknya, rasio investasi nonfinansial sektor perusahaan swasta menurun pada tahun 2004 menjadi 8,41 persen dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 19,34 persen pada tahun 2005. Angka ini merupakan rasio tertinggi investasi non finansial sektor perusahaan swasta sepanjang periode 2002-2007. Memasuki tahun 2006 rasio sektor perusahaan swasta mengalami penurunan kembali menjadi 17,73 persen. Namun, di tahun 2007, rasio investasi non finansial sektor perusahaan swasta meningkat menjadi 18,33 persen. Rasio ini menunjukkan bahwa sektor perusahaan swasta cukup berperan penting dalam pembentukan investasi fisik di negara ini.

Pada bagian lain, struktur investasi nonfinansial sektor rumah tangga bergerak pada kisaran angka 0,9 persen hingga 3 persen. Pada tahun 2002 hingga 2003 rasio investasi sektor ini mengalami penurunan sebesar 3,15 persen pada tahun 2002 menjadi 1,16 persen pada tahun 2003, kemudian naik menjadi sebesar 3,27 persen pada tahun 2004. Memasuki tahun 2005 hingga 2006, rasio sektor ini terus menurun tajam hingga 1,20 persen pada tahun 2005

dan 0,94 persen pada tahun 2006 yang merupakan rasio yang paling rendah dari sektor rumah tangga sepanjang periode 2002 hingga 2007. Rasio investasi non finansial sektor rumah tangga akhirnya meningkat kembali menjadi 1,14 persen pada tahun 2007.

Selain sektor bukan keuangan, struktur investasi nonfinansial sektor keuangan terhadap PDB pada periode 2002 hingga 2007 relatif tidak berubah di bawah 1 persen. Pada tahun 2003, rasio investasi nonfinansial di sektor ini sebesar 0,45 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002 yaitu 0,17 persen. Pada tahun 2004 terjadi penurunan menjadi 0,14 persen. Penurunan ini tidak berlangsung lama, sebab pada tahun 2005 kembali meningkat sebesar 0,07 persen menjadi 0,21 persen. Namun, pada tahun 2006 dan 2007, rasio investasi non finansial sektor keuangan terus merosot menjadi masing-masing 0,14 persen dan 0,11 persen. Semakin menariknya investasi finansial dibandingkan investasi fisik telah mendorong sektor keuangan juga lebih tertarik untuk menggerakkan dananya melalui investasi modal jangka pendek. Selama kurun waktu tersebut, rasio investasi nonfinansial sektor bank terhadap PDB pernah mengalami mengalami titik tertinggi, yaitu 0,39 persen yang terjadi pada tahun 2003.

4.1.3 Struktur Pinjaman Neto menurut Sektor

Pinjaman neto menggambarkan besaran selisih (kesenjangan) antara tabungan bruto terhadap investasi non finansial (investasi fisik) atau kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) maupun memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansial pada suatu sektor dalam NAD. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas perkembangan struktur pinjaman neto masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2002-2007

a. Sektor Keuangan

Struktur pinjaman neto pada sektor keuangan yang terdiri dari sektor bank dan bukan bank selama 2002-2007 selalu mengalami surplus. Pada tahun 2002, surplus yang dialami sektor ini relatif kecil dibandingkan periode berikutnya yaitu sebesar 0,16 persen terhadap PDB. Namun, sejak tahun 2003 pinjaman neto sektor ini meningkat cukup signifikan dengan nilai sebesar 4,15 % dan cenderung relatif menurun hingga tahun 2006 dengan nilai sebesar 0,22 persen terhadap PDB. Di tahun 2007 pinjaman neto sektor keuangan meningkat kembali dan mengalami *net lending* sebesar Rp 41,55 triliun (tabungan bruto; Rp 45,71 triliun dan investasi non finansial; Rp 4,16 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih tetap

memiliki kelebihan (surplus) dana yang dapat menjadi potensi bagi penggerak dunia usaha di periode tersebut.

TABEL 4.5. STRUKTUR PINJAMAN NETO MENURUT SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2002-2007 (persen)

SEKTOR	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	3,14	-0,70	-1,88	0,16	-0,32	-0,57
1 Pemerintah	0,83	1,11	1,11	0,67	2,02	1,40
2 Perusahaan	-0,39	-6,06	-5,79	-6,22	-6,79	-3,97
2.1 Pemerintah	-2,08	-1,47	-2,77	-2,40	-2,22	-0,88
2.2 Swasta ^{†)}	1,70	-4,59	-3,02	-3,82	-4,56	-3,09
3 Rumah Tangga	2,71	4,25	2,80	5,71	4,46	2,01
B. KEUANGAN	0,16	4,19	3,08	2,43	1,47	0,64
4 Bank ⁺⁺⁾	0,07	4,20	2,95	2,08	1,25	0,15
5 Bukan Bank	0,09	0,00	0,14	0,35	0,22	0,48
C. LUAR NEGERI	-3,30	-3,49	-1,19	-2,59	-1,15	-0,07
6 Luar Negeri	-3,30	-3,49	-1,19	-2,59	-1,15	-0,07
A. BUKAN KEUANGAN						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produk Domestik Bruto (PDB) (Miliar Rp.)	1.821.833	2.013.675	2.295.826	2.774.281	3.339.480	3.957.404

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

†)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk OM

b. Sektor Bukan Keuangan

Pinjaman neto pada sektor bukan keuangan (yang merupakan gabungan dari pemerintah, perusahaan dan rumah tangga) relatif berfluktuatif. Sektor ini mengalami surplus pada tahun 2002 sebesar 3,07 persen terhadap PDB dan menjadi defisit di tahun 2003 sebesar 0,55 persen terhadap PDB. Setelah mengalami defisit pada tahun 2003 hingga 2004 sebesar minus 0,55 persen dan minus 1,92 persen, sektor bukan keuangan kembali mengalami surplus pada tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,36 persen. Hal ini kembali menunjukkan bahwa sektor riil pada tahun 2005 dan 2006 tidak begitu banyak melakukan ekspansi di bidang investasi fisik. Namun, sektor ini kembali mengalami defisit pada tahun 2007 sebesar minus 0,98 persen (*net borrowing* sebesar minus Rp 38,66 triliun: dimana tabungan bruto sebesar Rp 941,17 triliun dan investasi non finansial sebesar Rp 979,83 triliun). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor riil lebih banyak melakukan kegiatan investasi fisik di tahun 2007 dibandingkan periode sebelumnya.

c. *Sektor Pemerintah*

Selama periode 2002 hingga 2007, struktur pinjaman neto sektor pemerintah terhadap PDB selalu surplus dan relatif berfluktuasi. Sektor ini selalu mengalami surplus (*net lending*) hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2006 sebesar 2,02 persen. Surplus tabungan pemerintah mengindikasikan bahwa sektor pemerintah merupakan faktor pendorong atau stimulus bagi kegiatan ekonomi di sektor riil. Sumber-sumber penyebab surplusnya sektor pemerintah utamanya berasal dari pinjaman luar negeri, hibah serta dari hasil penjualan surat utang negara (SUN). Pada tahun 2007 rasio pinjaman neto sektor pemerintah terhadap PDB menurun pada level sebesar 1,14 persen dan mengalami *net lending* sebesar Rp 48,08 triliun (tabungan bruto; Rp 179,12 triliun dan investasi non finansial: Rp 134,04 triliun). Hal ini mengindikasikan terjadi ekspansi di bidang investasi non finansial yang masih berlebih dibiayai oleh tabungan bruto pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tahun tersebut.

d. *Sektor Bisnis*

Selama kurun waktu 6 tahun, rasio pinjaman neto terhadap PDB pada sektor bisnis (perusahaan) selalu defisit. Di tahun 2002, rasio pinjaman neto terhadap PDB sektor ini defisit dan relatif kecil di bandingkan periode setelahnya yaitu sebesar minus 0,39 persen. Namun, sejak tahun 2003 sektor ini mengalami defisit yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini lebih ekspansif menggunakan sumber dananya untuk membiayai investasi fisiknya. Perubahan yang terjadi cukup signifikan dari tahun 2002 ke tahun 2003 ini dipengaruhi oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional pasca krisis moneter 1997 yang berpengaruh positif pada perusahaan untuk meningkatkan investasi fisiknya.

Di tahun 2007, pinjaman neto pada sektor ini masih defisit yaitu sebesar (tabungan bruto; Rp 584,71 triliun dan investasi non finansial; Rp 800,79) atau 5,46 persen terhadap PDB. *Net borrowing* yang terjadi pada sektor ini menunjukkan bahwa sumber dana sektor ini tidak cukup untuk membiayai ekspansi pada investasi fisiknya (baik dalam bentuk perluasan produksi maupun peningkatan kapasitas produksi. Sumber dana utama sektor bisnis untuk melakukan investasi fisik terutama berasal dari penerbitan surat berharga seperti obligasi, saham serta kredit jangka panjang (investasi) dari bank dan institusi lain.

e. *Sektor Rumah Tangga*

Selama periode 2002-2007, perkembangan pinjaman neto pada sektor rumah tangga selalu surplus. Dari tahun 2002-2005, pinjaman neto sektor ini relatif meningkat dengan puncak surplus pinjaman neto pada sektor ini terjadi di tahun 2005 sebesar 5,69 persen terhadap PDB. Namun, lain halnya yang terjadi pada tahun 2006 dan 2007, pinjaman neto

pada sektor ini semakin menurun. Meskipun terjadi penurunan, pinjaman neto sektor ini masih tetap surplus dan relatif besar dengan nilai di tahun 2007 sebesar Rp 132,33 triliun (tabungan bruto; Rp 177,33 triliun dan investasi non finansial; Rp 45 triliun) atau 3,34% terhadap PDB. Kondisi *net lending* pada periode tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan investasi fisik pada sektor tersebut masih sanggup dibiayai oleh sumber dana (tabungan bruto) yang dimiliki oleh sektor tersebut, dan sektor ini juga berpotensi untuk menyalurkan surplus dana yang ada kepada sektor lain yang defisit. Hal ini juga menunjukkan bahwa *priority of preference* penggunaan sumber dana pada sektor ini kurang diprioritaskan dalam bentuk investasi fisik. Sumber dana utama sektor rumah tangga utamanya berasal dari balas jasa faktor produksi, seperti upah dan gaji, pendapatan sewa dan bunga modal. Sedangkan penggunaan dana sektor rumah tangga umumnya dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito.

f. *Sektor Perbankan*

Selama periode 2002-2007, sektor perbankan selalu mengalami surplus meski cenderung menurun. Di sini jelas terlihat bahwa sektor bank selama periode 2002-2007 lebih dominan dalam menyalurkan dana dari pihak ketiga. Sumber dana sektor ini didapat dari simpanan kekayaan rumah tangga dalam bentuk deposito dan tabungan yang kemudian disalurkan ke perusahaan pemerintah maupun swasta dalam bentuk pemberian kredit usaha. Pada tahun 2007 sektor keuangan mengalami surplus pada level sebesar 1,05 persen terhadap PDB (*net lending* sebesar Rp 22,2 triliun; dimana tabungan bruto sebesar Rp 25,36 triliun dan investasi non finansial sebesar Rp 3,16 triliun), lebih besar dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 0,22 persen.

g. *Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*

Struktur pinjaman neto terhadap PDB pada sektor LKBB selama periode 2002-2007 relatif selalu surplus. Pada tahun 2003 rasio pinjaman neto sektor LKBB terhadap PDB bernilai nol. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh tabungan bruto yang dimiliki sektor tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi non finansialnya. Sejak tahun 2004, rasio pinjaman neto sektor LKBB terhadap PDB mulai surplus kembali hingga puncaknya di tahun 2007 pada level sebesar 0,49 persen. Di tahun 2007 sektor ini mengalami *net lending* sebesar Rp 19,34 triliun (tabungan bruto; Rp 20,35 triliun dan investasi non finansial; Rp 1,01 triliun).

h. Sektor Luar Negeri

Struktur pinjaman neto sektor luar negeri terhadap PDB selama periode 2002 hingga 2007 selalu defisit. Hingga tahun 2007 defisit yang dialami sektor ini relatif semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengurangi kegiatan investasi non finansialnya. Kondisi defisit (*net borrowing*) pada sektor ini mengindikasikan terjadinya *capital inflow*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembayaran utang kepada luar negeri lebih besar dibandingkan utang yang diterima oleh Indonesia setiap tahunnya setelah digunakan untuk memperoleh harta nonfinansial.

4.2 Tinjauan Ekonomi Indonesia berdasarkan NAD 2007

Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,3 persen, serta didukung oleh kondisi moneter yang stabil. Disamping itu perkembangan sektor perbankan dan pasar modal juga cukup menggembirakan.

Perkembangan moneter tahun 2007 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- Meningkatnya cadangan devisa negara hingga mencapai 56,9 miliar USD pada tahun 2007, Sedangkan perdagangan luar negeri mengalami net ekspor sebesar Rp. 159,45 triliun.
- Inflasi berada pada tingkat 6,59 % dan masih dalam koridor yang ditargetkan Pemerintah.
- BI Rate telah turun menjadi 8%.
- Nilai tukar rupiah yang relatif stabil, dengan kecenderungan menguat.

Dari sisi perbankan, perkembangan tahun 2007 ditandai dengan perbaikan di beberapa indikator, diantaranya adalah:

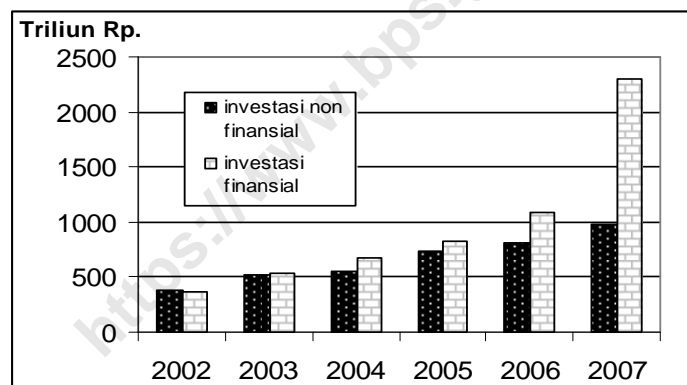
- Dana perbankan meningkat sebesar 17,6 %.
- Kredit meningkat sebesar 26,4%. Disamping itu pertumbuhan kredit juga terjadi secara luas (*across the board*) di semua sektor ekonomi serta pemanfaatan yang menyebar di seluruh Indonesia.
- Membaiknya kondisi bursa saham yang ditandai dengan meningkatnya IHSG yang sempat mencapai 2.778,95. Penyebab kenaikan indeks tersebut diantaranya adalah adanya 16 emiten baru (IPO) pada tahun 2007 (13 diantaranya terjadi pada triwulan IV-2007). Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 30 November 2007 terjadi penggabungan

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya(BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Sementara itu, perkembangan pada sektor riil makro dapat dilihat dari nilai nominal PDB tahun 2007 yang mencapai Rp 3.800,84 trilyun. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku (*current price*) mencapai lebih dari 15 persen. Sedangkan pendapatan perkapita mencapai 1.946 USD.

4.2.1. Investasi

Perkembangan investasi selama 5 tahun kebelakang dapat dilihat pada gambar 4.5. Investasi yang dimaksud disini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi finansial digambarkan melalui terciptanya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan kenaikan (perubahan) inventori. Sedangkan investasi non finansial digambarkan melalui kegiatan dari para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi dipasar modal dan pasar uang melalui instrumen finansial.



Gambar 4.4 Perkembangan Investasi tahun 2002-2007

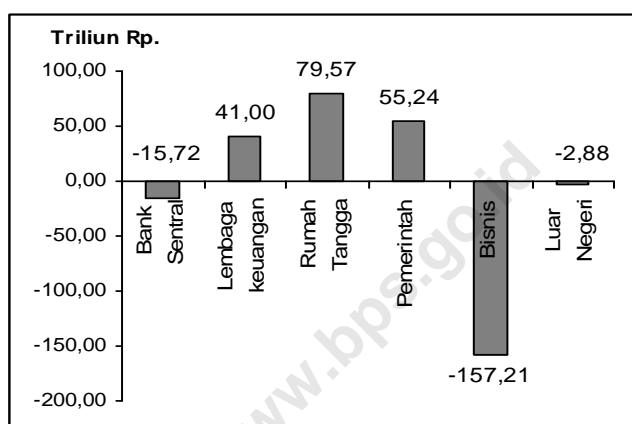
Dari gambar 4.4.dapat dilihat pula bahwa sejak tahun 2002-2007 investasi non finansial menunjukkan tren yang terus meningkat, meskipun peningkatannya terjadi secara gradual. Sedangkan investasi finansial mengalami lonjakan yang cukup tajam di tahun 2007.

Pangsa investasi finansial terhadap total investasi pada tahun 2007 sebesar 70,09%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56,97 %.

Sedangkan kondisi investasi non finansial tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan porsi dari investasi ini terhadap total investasi semakin lama semakin menurun. Pada tahun 2002 porsinya mencapai 51,10% tetapi pada tahun 2007 porsinya hanya mencapai 29,91 %.

4.2.2. Pinjaman Neto

Selama tahun 2007 sektor bisnis (termasuk perusahaan pemerintah) dan bank sentral mengalami *net borrowing*, sedangkan sektor lainnya mengalami *net lending*. *Net borrowing* yang terjadi di kedua sektor tersebut mengindikasikan investasi fisik yang dilakukan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan bruto yang berhasil dihimpun. Hal tersebut membutuhkan pembiayaan yang berasal dari pihak lain. Pada sektor bisnis kekurangan dana tersebut ditutup utamanya melalui penerbitan saham dan penyertaan sebesar Rp. 743,3 triliun. *net borrowing* yang terjadi pada bank sentral semata disebabkan karena terjadi dissaving pada tabungan brutonya.



Gambar 4.5. Pinjaman Neto menurut Sektor tahun 2007

Pada sektor lembaga keuangan terjadi net lending sebesar Rp. 41 triliun, yang sekitar setengahnya (Rp. 21,8 triliun) merupakan net lending yang dihasilkan oleh sektor perbankan.

4.2.3. Perkembangan Beberapa Instrumen Finansial

Pada tahun 2007 terjadi kenaikan penghimpunan dana sebesar Rp.259,1 triliun, dan sekitar Rp. 246,1 triliun merupakan uang simpanan dalam rupiah. Kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan sebesar Rp.425,6 triliun rupiah, yang disalurkan oleh seluruh sektor. Kenaikan kredit tersebut berasal dari naiknya kredit rupiah sebesar Rp. 158,4 triliun dan kredit dalam valas sebesar Rp. 47,4 triliun. Peningkatan kredit tersebut sedikit banyak juga dipicu oleh penurunan BI Rate yang diikuti oleh turunnya suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. Suku bunga deposito 1 bulan turun dari 8,96 % menjadi 7,19% diakhir tahun 2007 sedangkan suku bunga kredit pada periode yang sama turun dari 15,07% menjadi 13,00%.

Sektor Perbankan selama tahun 2007 telah menempatkan dananya dalam Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) sebesar Rp.7,4 triliun. Disamping itu Bank Indonesia (BI) juga menerima kenaikan dana akibat penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp.38,1 triliun. Akibat peningkatan dana dari kedua instrumen tersebut (yang merupakan instrumen untuk melakukan Operasi Pasar Terbuka), BI mengalami kenaikan kewajiban sebesar Rp.88,2 triliun. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Sentral selama tahun 2007 relatif kontraktif .

Peningkatan SBI sebesar Rp.38,1 triliun diantaranya berasal dari sektor Perbankan (Rp. 25,2 triliun), Lembaga keuangan bukan bank (Rp. 1,6 triliun), rumah tangga (Rp. 0,12 triliun), bisnis (Rp. 1,8 triliun), dan luar negeri (Rp. 9,9 triliun). Dilain pihak Bank Sentral melepaskan kepemilikannya atas Obligasi Rekap sebesar Rp.15,0 triliun (diantaranya Obligasi Negara SRBI-01/MK20 sebesar Rp.13,7 triliun). Sedangkan sektor Luar Negeri selama tahun 2007 ikut memberikan kontribusi dalam pembiayaan sektor Bisnis dan Rumah Tangga melalui pemberian kredit sebesar Rp. 193,1 triliun. Disisi lain kontribusi sektor luar negeri dalam pembiayaan dalam negeri juga tercermin dari investasi yang dilakukan dalam bentuk modal dan saham. Pada instrumen tersebut terjadi *net buying* sebesar Rp. 113,8 triliun yang dilakukan investor luar negeri pada beberapa saham unggulan disektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Selain membeli SBI, sektor Luar Negeri melakukan pembelian SUN sebesar Rp. 38,6 triliun.

Aset finansial yang mengalami kenaikan terbesar adalah modal saham dan penyertaan, yaitu naik sebesar Rp. 758,44 triliun atau 32,89 persen dari total kenaikan aset finansial. Hal ini terkait dengan maraknya penerbitan saham dan obligasi yang dilakukan oleh para pelaku dunia usaha untuk memperoleh dana yang mudah dan murah. Kenaikan instrumen modal saham dan penyertaan tersebut terkait dengan kapitalisasi dan IPO saham yang dilakukan oleh perusahaan bukan keuangan sebesar Rp. 641,93 triliun, lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp. 5,25 triliun dan sektor perbankan (termasuk bank sentral) sebesar Rp. 10,03 triliun. Pembeli terbesar dari surat berharga tersebut juga berasal dari sektor bisnis yakni mencapai Rp. 542,96 triliun atau 71,58 persen dari total penerbitan.

Jenis instrumen lainnya yang juga mengalami kenaikan adalah uang dan simpanan yang bertambah sebesar Rp. 259,05 triliun. Kenaikan tertinggi terjadi pada instrumen tabungan dalam rupiah, yakni bertambah sebesar Rp. 102,06 triliun serta giro dalam rupiah yang bertambah sebesar Rp. 65,01 triliun.

Di sisi lain, utang pemerintah dalam bentuk surat berharga pemerintah meningkat sebesar Rp. 59,25 triliun. Sebagian besar dari surat berharga pemerintah itu dimiliki oleh sektor bisnis dan luar negeri masing-masing sebesar Rp. 15,0 triliun dan Rp.38,66 triliun. Sedangkan sektor perbankan justru mencairkan surat berharga pemerintah sebesar Rp. 0,46 triliun.

4.3 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2007

Sebagai salah satu lembaga keuangan, LKBB juga memiliki posisi dan peran yang hampir sama dengan perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi dalam suatu sistem perekonomian. Perbedaannya, LKBB tergolong lembaga intermediasi jenis nondepositori (*non-depository intermediaries*), sedangkan bank termasuk lembaga intermediasi jenis depositori (*depository intermediaries*). Dengan adanya perbedaan ini, secara mendasar berdampak pada otoritas masing-masing lembaga tersebut dalam hal memperoleh atau menghimpun sumber dana bagi kegiatan usahanya. Perbankan, sesuai dengan ketentuan yang ada diperbolehkan menghimpun dana dari pihak ketiga baik dalam bentuk simpanan jenis giro (*demand deposit*), deposito berjangka (*time deposit*) maupun tabungan (*savings deposit*) dan dapat menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Sedangkan, sesuai dengan ketentuan yang ada, LKBB tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk simpanan (*depository*) dari pihak ketiga.

Walaupun LKBB tidak mempunyai akses sumber dana langsung dari masyarakat seperti halnya perbankan, namun sebagai lembaga intermediasi keuangan, LKBB mempunyai akses sumber dana yang tergolong unik dan khusus. Hal ini dikarenakan di antara berbagai jenis LKBB yang ada (asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian dan dana pensiun), masing-masing mempunyai akses sumber dana utama yang berbeda. Perbedaan tersebut biasanya sangat erat kaitannya dengan usaha inti (*core bussines*) yang dilakukannya. Asuransi misalnya, akses sumber dana utamanya diperoleh dari premi para nasabah pemegang polis. Sedangkan dana pensiun, sumber dana utamanya diperoleh dari iuran peserta dan/atau iuran pemberi kerja (lembaga tempat peserta bekerja). Untuk memperkuat struktur keuangannya, kedua lembaga tersebut juga masih bisa mencari sumber dana lain seperti akses kredit perbankan.

Sebaliknya, perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jenis LKBB yang tidak mempunyai akses sumber dana secara khusus. Untuk mendukung kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan sangat tergantung kepada dukungan sumber dana eksternal

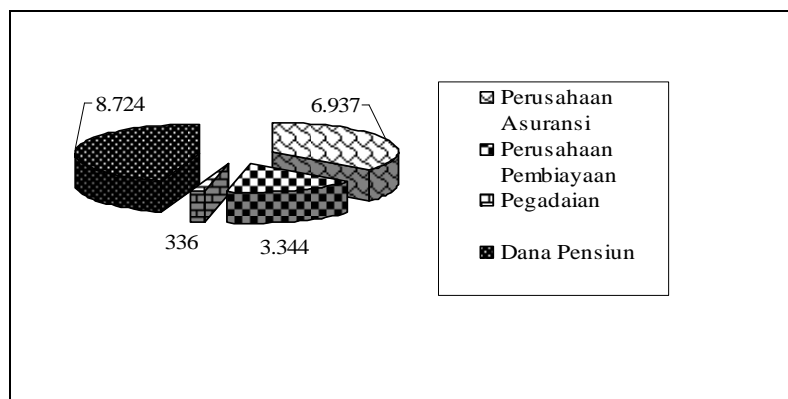
khususnya dari kredit perbankan. Mengingat cakupan kegiatan perusahaan pembiayaan cukup beragam yaitu kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit, anjak piutang dan pembiayaan konsumen, maka akses kreditnya pun tidak hanya terbatas dari kredit bank dalam negeri tetapi juga dari kredit bank asing.

Terbatasnya sumber dana internal yang dimiliki LKBB sebagai lembaga intermediasi keuangan, mengakibatkan LKBB tidak bisa menghindari dari ketergantungan sumber dana dari kredit perbankan. Namun, dalam menjalankan peran intermediasinya, kedua sumber dana tersebut saling menunjang dan saling melengkapi. Hal ini bisa dibuktikan untuk beberapa fungsi intermediasi tertentu yang tidak dilakukan oleh perbankan, peluang ini biasanya akan dimanfaatkan LKBB. Tidak mengherankan jika untuk beberapa segmen tertentu dalam kegiatan intermediasi, kegiatan yang dilakukan oleh LKBB justru telah menjadi produk unggulan dan strategis di mata para konsumen, misalnya pembiayaan kartu kredit. Dengan pertimbangan bahwa peran intermediasi LKBB yang cukup strategis dan berpotensi dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan, maka dalam tulisan ini akan dianalisis arus dana internal antar sektor LKBB khususnya yang terjadi selama tahun 2007.

Pada Tabel 15 ditunjukkan bahwa secara total sebenarnya dalam tahun 2007, LKBB ini mengalami surplus. Hal ini bisa dilihat dari surplus yang terjadi sekitar Rp 19 342 miliar. Surplus yang terjadi pada tahun 2007 ini meningkat 166,8 persen dari surplus yang terjadi pada tahun 2006. Surplus yang terjadi pada LKBB pada tahun 2007 tersebut juga diikuti dengan meningkatnya tabungan bruto menjadi sebesar Rp 20 349 miliar, dan pada saat yang sama investasi nonfinansial juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1 006 miliar. Peningkatan ini diduga karena terjadi penurunan beberapa suku bunga perbankan dan sudah membaiknya persepsi terhadap iklim investasi yang berakibat pada tingginya daya serap sektor riil terhadap kredit perbankan. Sebagian portfolio investasi LKBB yang sebelumnya lebih banyak dalam bentuk simpanan seperti deposito atau tabungan di perbankan, secara perlahan mulai dialihkan dalam bentuk investasi nonfinansial seperti pembelian bangunan atau aset tak bergerak lainnya

Jika diamati dari kinerja sektoralnya, surplus yang terjadi pada LKBB di tahun 2007 ini lebih banyak disebabkan oleh surplus yang terjadi pada sektor-sektor, seperti pada perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian, dan perusahaan pembiayaan, yang masing-masing surplus sebesar Rp 8 724 miliar, Rp 6 937 miliar, Rp 336 miliar dan Rp 3 344 miliar, atau meningkat sebanyak 72 persen, 294 persen, 35 persen, dan 2044 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, semua sektor tersebut mengalami

peningkatan surplus. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil dan aman sehingga sektor-sektor tersebut mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik.

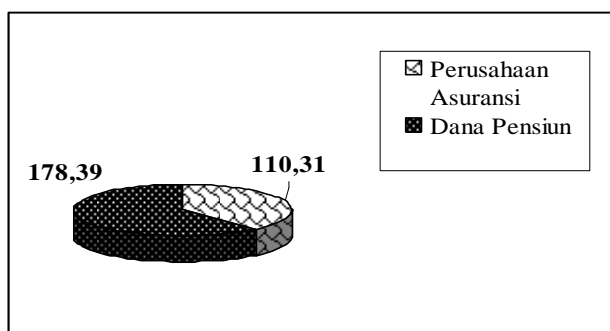


Gambar 4.6 Sumber dana eksternal untuk masing-masing sektor pada tahun 2007 (Miliar Rp)

Sebagian besar surplus yang terjadi pada sektor LKBB disebabkan oleh meningkatnya dukungan dana internal dalam bentuk tabungan bruto sebesar Rp 20 349 miliar, serta didukung pula peningkatan dana eksternal sebesar Rp 1 006 miliar. Jika dilihat dari aliran dana sektoralnya, tampak bahwa meningkatnya aliran dana eksternal ke LKBB ini merupakan refleksi dari meningkatnya sumber dana eksternal pada semua sektor, seperti perusahaan asuransi meningkat menjadi sebesar Rp 6 937 miliar, perusahaan pembiayaan sebesar Rp 3 344 miliar, pegadaian sebesar Rp 336 miliar, dan dana pensiun sebesar Rp 8 724 miliar. Dana pensiun memberikan kontribusi paling besar untuk aliran dana eksternal ke LKBB. Dibandingkan dengan tahun 2006, aliran sumber dana eksternal ke perusahaan pembiayaan meningkat paling tajam dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Hal ini diduga karena menurunnya tingkat suku bunga perbankan, sehingga kualitas sumber dana eksternal mulai pulih yang ditandai dengan berkurangnya jumlah kredit macet. Sedangkan jika diamati dari perubahan jenis instrumen finansialnya, peningkatan terbesar disebabkan oleh meningkatnya instrumen surat-surat berharga baik dalam jangka pendek (Rp -110 miliar) maupun jangka panjang (Rp 3 382 miliar) dan pada instrumen kredit dagang (Rp -2 miliar). Peningkatan surat berharga jangka pendek yang terjadi pada LKBB, sebagian terjadi pada perusahaan dana pensiun (Rp 5 miliar), sedangkan pada surat berharga jangka pendek, sebagian besar terjadi pada perusahaan pembiayaan (Rp 2 825 miliar). Secara bersamaan, peningkatan tersebut juga disebabkan meningkatnya perolehan dana dari kredit dagang, yang sebagian besar dialami oleh pegadaian (Rp - 2 463 miliar).

Beberapa instrumen finansial lainnya juga mengalami peningkatan, seperti instrumen kredit serta cadangan asuransi dan pensiun, yaitu masing-masing sebesar Rp 10 666 miliar,

dan Rp 47 426 miliar. Secara keseluruhan, peningkatan cadangan asuransi dan pensiun ini disebabkan meningkatnya cadangan asuransi dan pensiun pada perusahaan asuransi sebesar Rp 33 887 miliar, dan perusahaan dana pensiun sebesar Rp 13 538 miliar.



Gambar 4.7 Pertumbuhan cadangan dana asuransi dan pensiun (persen)

Dibandingkan dengan tahun 2006, cadangan dana pensiun pada perusahaan dana pensiun mengalami peningkatan yang tajam sebesar 178 persen, sedangkan pada perusahaan asuransi sebesar 110 persen. Dalam kondisi perekonomian yang sudah mulai berangsur pulih, meningkatnya kemampuan perusahaan asuransi dalam membentuk cadangan ini diduga disebabkan adanya penurunan klaim, di samping sudah mulai meningkatnya minat masyarakat dalam membeli polis asuransi. Begitu juga halnya dengan perusahaan dana pensiun. Peningkatan ini lebih banyak disebabkan adanya peningkatan minat masyarakat ikut dalam program dana pensiun baik melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Sepanjang tahun 2007 ini, aliran dana eksternal ke LKBB dalam bentuk kredit perbankan justru mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya aliran kredit perbankan dalam rupiah ke LKBB sebesar Rp 3 583 miliar. Sementara itu, perolehan dana dari modal saham dan penyertaan mengalami peningkatan sebesar Rp 7 508 miliar. Peningkatan modal saham dan penyertaan yang terjadi pada LKBB, sebagian besar merupakan peningkatan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan (Rp 4 237 miliar).

Stabilnya kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2007 ini berdampak positif terhadap perkembangan LKBB di tanah air. Dampak terbesar dirasakan oleh perusahaan pembiayaan, karena dilihat dari struktur sumber pendanaannya, sumber dana utama perusahaan pembiayaan berasal dari pinjaman bank baik yang berasal bank dalam negeri maupun pinjaman dari bank di luar negeri. Perusahaan pembiayaan sebagai institusi intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yang spesifik seperti halnya LKBB lain. Dengan demikian, untuk mendukung kegiatannya, perusahaan pembiayaan sangat tergantung

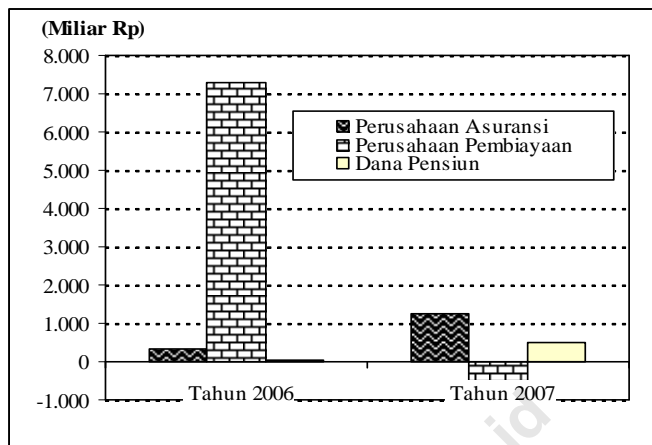
pada aliran dana eksternal terutama kredit perbankan. Seiring dengan perkembangan suku bunga perbankan yang menurun, stabilitas makroekonomi yang membaik, imbal hasil yang menarik, kondisi eksternal yang kondusif, dan bunga pinjaman luar negeri yang lebih rendah, maka perusahaan pembiayaan juga sudah mulai agak bergairah dalam melakukan kegiatannya. Representasi mulai bergairahnya perusahaan pembiayaan ini bisa dilihat dari meningkatnya sumber dana eksternal terutama yang berasal dari kredit dalam valas (Rp 7 054 miliar).

Perusahaan pembiayaan sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Bila kondisi perekonomian mengalami krisis, maka perusahaan pembiayaan langsung terkena dampaknya. Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian cukup kondusif, maka akan berdampak positif terhadap perusahaan pembiayaan. Misalnya dalam hal penggalan sumber dana, perusahaan pembiayaan yang mengandalkan sumber dana eksternal dari kredit dagang dan kredit perbankan sebagai sumber utama, akan sulit melakukan penjadwalan utang (*rescheduling*) jika kondisi perbankan sebagai krediturnya sendiri sedang mengalami kesulitan. Sedangkan secara internal, perusahaan pembiayaan sendiri juga sering menghadapi persoalan yang disebabkan oleh tindakan ketidaksepadanan (*mismatch*) dalam pengelolaan utangnya. Paling tidak, ada dua indikator potensial sebagai penyebab timbulnya permasalahan dalam pengelolaan utang di perusahaan pembiayaan yaitu *maturity mismatch* dan *currency mismatch*.

Persoalan *maturity mismatch* terjadi karena perusahaan pembiayaan kurang tepat dalam melakukan penyaluran kredit. Penyebabnya adalah sumber dana yang diperoleh melalui fasilitas kredit jangka pendek disalurkan untuk pembiayaan jangka panjang. Sedangkan *currency mismatch* ini terjadi karena fasilitas pinjaman dalam US dollar (valas) ternyata banyak di antaranya yang disalurkan untuk pembiayaan yang pengembaliannya dalam rupiah. Persoalan ini akan bertambah berat, karena jika kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan kalangan dunia usaha, maka nasabah (*lessee*) akan memutuskan kontrak atau terpaksa tidak bisa melakukan pembayaran.

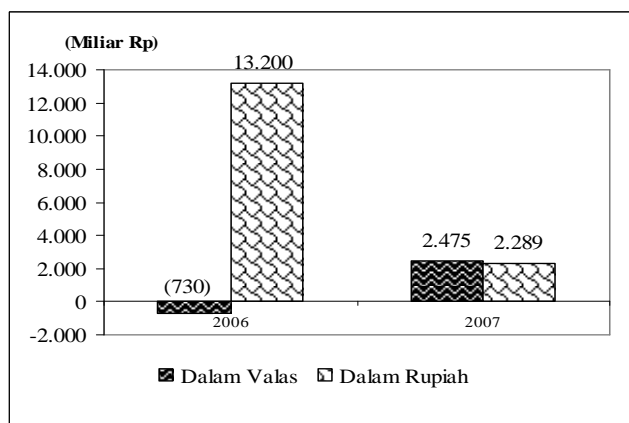
Selanjutnya, jika ditelusuri dari sisi penggunaan dana yang dilakukan LKBB, tampak bahwa sepanjang tahun 2007 beberapa pos penggunaan dana pada LKBB ini mengalami peningkatan sangat signifikan, yaitu pos penggunaan untuk pembelian surat berharga jangka panjang (Rp 34 589 miliar), modal saham dan penyertaan (Rp 38 810 miliar), dan transaksi rupa-rupa (Rp -4 948 miliar). Penurunan justru terjadi pada sisi penggunaan dana dari transaksi antar bank yang berupa pembelian SBI, yaitu sebesar Rp 1 162 miliar. Penurunan

tersebut berasal dari menurunnya penggunaan dana pada perusahaan pembiayaan secara tajam menjadi hanya sebesar Rp -524 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 108 persen. Sedangkan pada perusahaan asuransi penggunaan dana sedikit meningkat menjadi sebesar Rp 1 243 miliar, serta pada perusahaan dana pensiun sebesar Rp 486 miliar, atau meningkat sebesar 271 persen, dan 697 persen dibandingkan dengan tahun 2006.



Gambar 4.8 Rekening antar bank pada masing-masing sektor (Miliar Rp)

Penggunaan dana untuk kredit dagang juga mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp 1 532 miliar. Penggunaan dana kredit dagang menurun karena terjadi penurunan penggunaan di perusahaan asuransi menjadi sebesar Rp 1 464 miliar, pegadaian menjadi sebesar 68 miliar. Di samping itu, peningkatan juga terjadi pada penggunaan dana kredit perbankan. Secara agregat, kredit perbankan yang disalurkan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp 42 013 miliar yang sebagian besar digunakan oleh perusahaan pembiayaan sebesar Rp 39 482 miliar. Pembelian surat berharga jangka pendek juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 103 miliar, sebesar Rp 159 miliar dilakukan oleh perusahaan pembiayaan

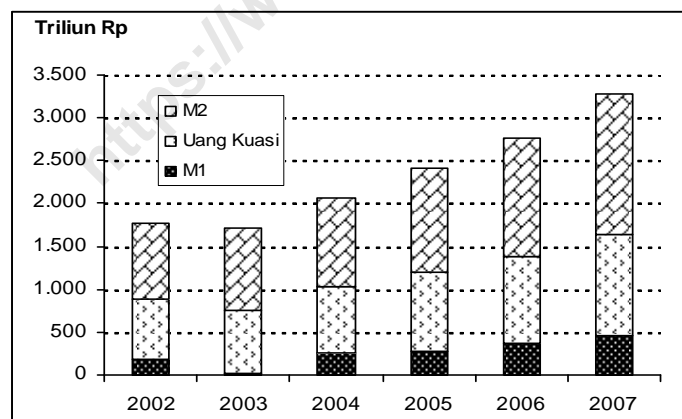


Gambar 4.9 Penggunaan uang dan simpanan menurut jenis instrumen

Secara total pada tahun 2007, penggunaan uang dan simpanan menurun menjadi sebesar Rp 4 765 miliar. Penurunan ini terjadi karena menurunnya penggunaan uang dan simpanan pada perusahaan asuransi menjadi sebesar Rp 1 584 miliar, perusahaan pembiayaan sebesar Rp 2 743 miliar kemudian perusahaan dana pensiun sebesar Rp 466 miliar dan perusahaan pegadaian sebesar Rp -29 miliar. Sedangkan jika diamati dari perubahan jenis instrumen uang dan simpanannya, penurunan terbesar terjadi pada instrumen uang dan simpanan dalam rupiah, yaitu sebesar Rp 2 289 miliar yang dialami oleh perusahaan asuransi (Rp 56 miliar), pegadaian (Rp -27 miliar), dan perusahaan dana pensiun (Rp 316 miliar). Peningkatan yang tajam justru terjadi pada jenis instrumen uang dan simpanan dalam valas, yaitu sebesar Rp 2 475 miliar yang sebagian besar disumbang oleh perusahaan asuransi, yaitu sebesar Rp 1 528 miliar.

4.4 *Financial Deepening dan Velocity of Income*

Jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai stabilisasi harga dan pengendalian suku bunga dengan melakukan penambahan atau pengurangan uang beredar. Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan agregat moneter dan gambaran *velocity of income* (V) selama periode 2002-2007.



Gambar 4.10 Perkembangan jumlah uang beredar tahun 2002-2007 (triliun rupiah)

Perkembangan uang beredar (M2) dalam periode 2002-2007 tercermin pada Tabel 4.6 yang juga menggambarkan hubungan antara M1, M2 dengan PDB. Apabila diperhatikan perkembangan M1 dalam periode 2002-2007, secara rata-rata meningkat sebesar 19,35 persen. Jumlah M1 pada tahun 2007 mencapai Rp 460 842 miliar atau meningkat sebesar 27,63 persen dibandingkan keadaan tahun 2006. Sedangkan perkembangan uang kuasi secara rata-rata dalam periode 2002-2007 mencapai 11,41 persen, dengan peningkatan tertinggi

terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 18,16 persen. Jumlah uang beredar (M2) pada tahun 2007 mencapai Rp 1 643 203 miliar, dimana 64,64 persen atau Rp 1 182 361 miliar diantaranya adalah uang kuasi dan 35,34 persen atau Rp 460 842 miliar adalah M1. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah uang beredar secara rata-rata dalam periode 2002-2007 mencapai 13,29 persen dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 16,42 persen. Peningkatan yang tinggi di tahun 2005 ini disebabkan oleh adanya peningkatan uang kuasi – simpanan tetap dan tabungan di bank-bank umum yang meningkat sebesar 18,29 persen, sedangkan peningkatan M1 hanya sebesar 11,07 persen.

Untuk mengukur pertumbuhan finansial dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, indikator yang biasa digunakan adalah rasio M1 terhadap PDB dan rasio M2 terhadap PDB. Sedangkan indikator untuk melihat bagaimana *velocity of income (V)* yang menggambarkan perputaran uang beredar adalah rasio PDB/M1. Jika *V* rendah mempunyai makna perputaran uang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika *V* tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang tersebut dalam transaksi.

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa hubungan yang ada antara M1 terhadap PDB selama periode 2002-2007 relatif tidak berubah, hal ini ditunjukkan oleh rasio M1 terhadap PDB berkisar antara 10 persen hingga 11 persen atau secara rata-rata 10,79 persen. Hal ini berarti peran M1 dalam proses penciptaan PDB pada tiap tahunnya secara rata-rata adalah sebesar 10,79 persen.

**TABEL 4.6. UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TAHUN 2002-2007**

Tahun	Uang Beredar (Miliar Rp)			PDB (Miliar Rp)	Velocity (PDB/M1)	Rasio (%)	
	M1	Uang Kuasi	M2			M1/PDB	M2/PDB
2002	191 939	691 969	883 908	1 863 275	9,71	10,30	47,44
2003	223 799	731 893	955 692	2 036 352	9,10	10,99	46,93
2004	253 818	779 709	1 033 527	2 295 826	9,05	11,06	45,02
2005	281 905	921 310	1 203 215	2 784 960	9,88	10,12	43,20
2006	361 073	1 021 001	1 382 074	3 338 196	9,25	10,82	41,40
2007	460 842	1 182 361	1 643 203	3 957 404	8,59	11,65	41,52

Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia
2) Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Gambaran rasio M2 terhadap PDB dalam periode 2002-2007 terlihat agak berfluktuasi yaitu berkisar antara 41,40 persen sampai dengan 47,44 persen. Rasio M2 terhadap PDB selama periode 2002-2007 yang cenderung menurun merupakan dampak makin menurunnya tingkat suku bunga perbankan, walaupun pada tahun 2007 meningkat dari 41,4 menjadi 41,52 (kenapa). Hal tersebut berarti bahwa pada sektor perbankan telah terjadi kelebihan likuiditas, sehingga sektor ini agak mengerem masuknya uang kuasi yang berupa tabungan berjangka dan tabungan penduduk lainnya. Keadaan ini puncaknya dapat dilihat pada tahun 2007, dimana rasionya pada tahun tersebut hanya mencapai 41,52 persen.

<https://www.bps.go.id>

BAB V KESIMPULAN

1. Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang menggambarkan penggunaan tabungan bruto di masing-masing sektor baik untuk membiayai investasi real maupun investasi finansial. Sektor yang tabungannya lebih kecil dari kebutuhan investasi real (sektor defisit) akan melakukan pinjaman neto, yang dalam kerangka NAD dapat diterjemahkan sebagai selisih antara jumlah perubahan harta dan kewajiban finansial. NAD disajikan dalam bentuk matriks, barisnya menunjukkan kategori transaksi finansial dan kolomnya menunjukkan pembagian sektor ekonomi. Setiap sektor mempunyai dua kolom, kolom penggunaan untuk mencatat semua perubahan (arus) harta finansial, sedangkan kolom sumber mencatat perubahan kewajiban finansial. NAD berguna sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional dan mengevaluasi sistem pengumpulan data keuangan yang selama ini terus dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik dan instansi-instansi terkait lainnya. NAD merupakan sistem data tertutup, karena di dalamnya melibatkan pula sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem tertutup berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Untuk masing-masing sektor juga berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan perubahan kewajiban.
2. Sebagai suatu sistem data, NAD tentunya mempunyai beberapa masalah dan keterbatasan. Secara teoritis, karena NAD disusun dari dua neraca berurutan maka gejala arus finansial seperti uang kas dan deposito yang mempunyai fluktuasi cukup tinggi dalam waktu yang pendek, tidak mungkin dapat diantisipasi perubahannya dalam skala tahunan. Di samping itu, NAD belum mampu untuk menyusun arus finansial yang memakai konsep *true flows* karena faktor-faktor seperti perubahan kurs, *capital*

gains/losses dan revaluasi aset belum dapat dideteksi secara baik dari neraca perusahaan.

3. Kondisi data yang dipakai untuk NAD 2002-2007 masih sangat bervariasi. Pada tingkat yang baik, misalnya sektor perbankan, datanya sudah merupakan neraca akhir tahun yang dikonsolidasi, tetapi data untuk sektor lain masih merupakan neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sebaliknya pada tingkat yang kurang baik, sejumlah sektor hanya mengandalkan data sekunder yang ada, bahkan ada sektor-sektor yang datanya tidak tersedia sama sekali sehingga diperlukan survei-survei khusus dan penggunaan metode alternatif. Oleh karena itu, sistem pengadaan dan pengolahan data pada masing-masing unit penyedia data masih perlu dikembangkan. Paling tidak untuk kebutuhan data NAD, misalnya dapat diintegrasikan dengan sistem pengadaan data di masing-masing sektor. Di samping itu, bantuan dan peran serta dari berbagai sumber data baik instansi pemerintah, dunia swasta maupun masyarakat masih terus diharapkan guna memperbaiki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penyusunan NAD.
4. Untuk dapat memantau perkembangan ekonomi yang terjadi khususnya perubahan pada struktur sektor finansial, maka NAD Indonesia akan terus disesuaikan dan disempurnakan dengan tetap memperhatikan keterbandingannya dengan NAD sebelumnya. Pembagian sektor dalam NAD harus tetap dapat mengantisipasi munculnya jenis-jenis lembaga keuangan yang baru, sebaliknya menghilangkan sektor-sektor yang kurang penting di masa mendatang. Demikian juga penentuan kategori transaksi, harus selalu disesuaikan dengan instrumen-instrumen finansial baru yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan demikian diharapkan NAD Indonesia akan selalu representatif dan peka terhadap perkembangan dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi.
5. Selama periode 2002-2007, komposisi tabungan bruto *sektor bukan keuangan* terhadap total tabungan berkisar antara 95,82 persen sampai dengan 115,30 persen, atau rata-rata sebesar 98,13 persen. Sedangkan komposisi tabungan bruto terhadap total tabungan untuk *sektor keuangan* dan *luar negeri* secara rata-rata masing-masing sebesar 13,06 persen dan minus 12,14 persen selama periode yang sama.

6. Sumbangan investasi nonfinansial (real) sektor bukan keuangan secara rata-rata selama periode 2002-2007 sebesar 98,75 persen, dan sisanya sebesar 1,25 persen merupakan rata-rata kontribusi investasi finansial sektor keuangan. Dari rata-rata sumbangan sebesar 98,75 persen tersebut, sekitar 69,57 persen di antaranya merupakan kontribusi perusahaan pemerintah dan swasta, dan sisanya merupakan kontribusi investasi pemerintah dan rumah tangga.
7. Secara umum ada dua sumber pembiayaan pembangunan. Pertama, berasal dari dalam negeri dan kedua berasal dari luar negeri. Keadaan pembiayaan pembangunan tersebut dapat dijelaskan melalui *struktur pinjaman neto terhadap produk domestik bruto*. Besarnya *struktur pinjaman neto yang berasal dari dalam negeri terhadap produk domestik bruto* selama periode 2002-2007 untuk sektor rumah tangga rata-rata 3,03 persen, sedangkan yang berasal dari sektor keuangan rata-ratanya mencapai 2,16 persen. Kekurangan dana dalam negeri tersebut diperoleh dari pinjaman luar negeri dengan rata-rata 2,27 persen.
8. Transaksi finansial dengan menggunakan berbagai macam instrumen serta dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi yang terjadi pada tahun 2007 adalah sebesar sebesar Rp 2.305,6 triliun. Instrumen finansial *uang dan simpanan* yang tercipta pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 259,0 triliun, terdiri dari uang dan simpanan dalam rupiah sebesar Rp 246,1 triliun. Penyimpanan dana terbesar dalam bentuk uang dan simpanan adalah sektor rumah tangga, yaitu sebesar Rp 126,0 miliar.
9. Pada tahun 2007 semua sektor mengalami penambahan tabungan bruto yang positif, kecuali sektor bank sentral dan luar negeri. Sebagian besar (sekitar 51 %) dari seluruh tabungan bruto merupakan tabungan bruto milik sektor bisnis. Jumlah tabungan sebesar itu telah digunakan seluruhnya untuk keperluan investasi non finansial. Sektor bisnis dan perusahaan pemerintah merupakan sektor yang melakukan investasi finansial melebihi tabungan brutonya. Pada tahun 2007 net borrowing yang terjadi pada sektor bisnis sebesar Rp.122,2 triliun, sedangkan pada sektor perusahaan pemerintah hanya sebesar Rp. 34,9 triliun. Sehingga kekurangannya ditutupi dari investasi finansial yang dimiliki.

Lampiran 1

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

I. SEKTOR KEUANGAN (FINANCIAL SECTOR)

1.1 Otoritas Moneter (*Monetary Authorities*)

Otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi otoritas moneter seperti tersebut di atas, dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Sejumlah kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Otoritas Moneter di Indonesia di pegang oleh BI, maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia neraca otoritas moneternya hanya merupakan neraca BI.

1.2 Bank (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah.

1.2.1 Bank Pencipta Uang Giral (*Deposit Money Banks*)

Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. BPUG terdiri dari bank persero, bank umum swasta nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut kecuali yang berkategori bank non devisa adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk tujuan modal kerja maupun investasi, serta melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD. Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga bisa dimaklumi jika wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa.

1.2.3 Perbankan Syariah (*Profit-sharing Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU.No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali ditindaklanjuti dan secara transparan telah disebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

Dalam UU. No. 10 tahun 1998 tersebut juga telah dikenalkan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

1.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan penunjang asuransi, dana pensiun, pegadaian dan pasar modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Termasuk di dalam cakupan kegiatan perusahaan pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (leasing), pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance) dan kartu kredit (credit card). Perusahaan pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, tetapi perusahaan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*non depositories institution*). Oleh karena itu, sebagian

besar sumber dana perusahaan pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan perusahaan pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (lessor) kepada para penyewa guna usaha (lease) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "finance lease" maupun "operating lease" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha anjak piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari sipenjual baik dengan *with recourse* maupun *without recourse*. Dalam hal anjak piutang jenis *with recourse* berarti tanggungjawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan konsumen adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan kartu kredit adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit sendiri merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit biasanya pihak bank sebagai *issuer*. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*, sehingga pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

1.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan sesudahnya dapat

diperpanjang kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, usaha perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) usaha asuransi, (b) usaha penunjang usaha asuransi.

1.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*Loss Insurance Business*)

Usaha asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha asuransi jiwa yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha jasa penunjang asuransi terdiri dari (i) usaha Pialang asuransi, (ii) usaha Pialang reasuransi dan (iii) usaha penilai kerugian asuransi, (iv) usaha konsultan aktuarial dan (v) usaha agen asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (*Loss Adjuster Business*)

Usaha penilai kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuaria (*Actuarial Consultan Business*)

Usaha konsultan aktuaria yaitu usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (*Insurance Agency Business*)

Usaha agen asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan di bidang pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggung.

1.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan asuransi sosial seperti sebelumnya. Yang diatur adalah program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :Perusahaan asuransi sosial di Indonesia seluruhnya berjumlah lima buah, yaitu:

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti.
- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh (Perum) ASABRI.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (persero) Taspen.

- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU.No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) program pensiun berdasarkan keuntungan (PPBK), (ii) program pensiun iuran pasti (PIIP) dan (iii) program pensiun manfaat pasti (PPMP). Sedangkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun ada dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham maupun disimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito.

1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Program pensiun jenis ini biasanya karyawan tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungan dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Program pensiun jenis ini kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja maupun peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini berarti dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak

dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, iuran yang harus dibayarkan peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dan pihak emiten. Dalam hal ini pasar modal sebagai sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana diluar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau Initial Public Opinion (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Di Indonesia ada dua sarana untuk melangsungkan kegiatan pasar modal yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti halnya broker pasar modal, underwriter, adjuster dan penjamin emisi.

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (NONFINANCIAL SECTORS)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institusi yang memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor pemerintah, perusahaan pemerintah, perusahaan swasta (bisnis) dan rumah tangga.

2.1 Pemerintah (*Government*)

Yang dimaksud sektor pemerintah disini adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintahan dan melakukan kegiatan pelayanan kepada

masayarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah adalah kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah tidak termasuk didalamnya Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Dalam penyusunan NAD Indonesia kedua sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Untuk sektor pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) pemerintah pusat dan (ii) pemerintah daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: departemen-departemen, lembaga nondepartemen, lembaga tinggi negara dan lembaga pemerintah lain, maupun semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

2.2 Perusahaan Pemerintah (*Government Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Termasuk juga di sini Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, serta tatacara pembinaan dan pengawasannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi:

Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Kecuali Pertamina yang badan hukumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971. Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang nonfinansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. Pada umumnya kegiatan utamanya membutuhkan modal (investasi) yang berskala besar. Sedangkan BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor bank.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

2.2.3 Badan Urusan Logistik (*National Food Authority*)

Merupakan lembaga pemerintah Non-departement yang dibentuk berdasarkan Keppres R.I. No. 11 Tahun 1969. Tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menghimpun, menyalurkan, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat berupa beras, jagung, terigu/gandum, gula pasir, kacang kedelai dan sebagainya. BULOG tidak digolongkan sebagai bagian dari kegiatan BUMN karena bentuk, sifat dan tujuannya berbeda. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai usahanya tidak berasal dari anggaran belanja negara, tetapi dari pinjaman bank-bank dalam negeri (BI, BBD, BRI), pihak lain dan kekayaan/tabungan yang berasal dari usahanya.

2.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup koperasi dan perusahaan swasta nonfinansial.

2.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi perkotaan (Non-KUD) dan koperasi pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya, koperasi yang berbentuk bank (BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk koperasi sekunder dengan berbagai jenisnya. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Non rural Cooperative*)

Koperasi Non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi-fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan. Pertama adalah koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya. Kedua, golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat. Dan ketiga adalah koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

2.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Yang dimaksud dengan koperasi pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Nonfinansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat, kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Pemilik usaha ini bisa perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga dan sebagainya yang bermaksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa perseroan terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga. Karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2.4 Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga⁸ dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

III. SEKTOR LUAR NEGERI (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dengan bukan penduduk (nonresiden/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan nonresiden ini dicatat di dalam neraca pembayaran (*balance of payments*).

⁸ Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang bersifat tetap maupun yang sementara (dalam batas waktu tertentu).

Lampiran 2

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto

Tabungan bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan barang modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain dari itu, penyusutan barang modal meliputi juga perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan meliputi pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup penerimaan transfer berjalan, seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri dan pajak yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga. Pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran dividen dan transfer seperti pembayaran pajak. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dimaksudkan sebagai pengeluaran modal.

0200 Perolehan Harta Nonfinansial

Merupakan penjumlahan dari pembentukan modal tetap bruto, kenaikan stok dan pembelian harta tak berwujud neto.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, bandara, serta mesin peralatan. Pengeluaran barang modal dan

bangunan untuk keperluan militer tidak dicakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

0220 Kenaikan Stok

Yang dimaksud kenaikan stok adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga di sini persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Otoritas Moneter merupakan bagian dari kategori transaksi cadangan valuta asing pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200

Pinjaman neto merupakan selisih antara tabungan bruto dengan perolehan harta nonfinansial.

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih statistik adalah selisih antara peminjaman neto (sisi transaksi real, bagian atas NAD) dan investasi finansial neto (sisi finansial NAD). Kalau dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka peminjaman neto harus sama dengan investasi finansial neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut. Penyebab utama adanya selisih statistik di beberapa sektor, adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

0500 Investasi Finansial Neto = 0600 - 0700

Merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial

Merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial

Merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan valuta asing (valas) pemerintah terdiri dari emas moneter, *special drawing rights*, posisi cadangan di IMF, deposito, dan surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan valas pemerintah adalah aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor luar negeri. Dalam penghitungan pendapatan nasional, emas moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas Moneter

Mencakup emas yang dimiliki atau disimpan Bank Indonesia, termasuk juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 Special Drawing Rights

Merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan Bank Indonesia, giro dan deposito berjangka di bank-bank luar negeri, wesel ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya

Mencakup seluruh klaim luar negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi: cadangan valas pemerintah, deposito dalam valas, pinjaman dalam valas, tagihan jangka pendek dan jangka panjang dalam valas, serta obligasi.

1000 Uang Dan Simpanan (Jumlah)

Terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, deposito dan giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta deposito dan simpanan lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di luar negeri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah uang kartal dan uang logam yang beredar, giro, tabungan, deposito berjangka dan tabungan giro pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing, yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang

Mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro

Merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 Tabungan

Merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 Tabungan Lainnya

Mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG, dan bank asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

1021 Uang Kertas dan Logam

Mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak dimasukkan dalam kategori ini, tetapi masuk kategori klaim antar bank (2000).

1023 Tabungan

Merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi

Tabungan giro pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro, berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dari surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank biasanya digunakan untuk tujuan bisnis, tetapi kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada kredit konsumsi; termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini mencakup pinjaman bank dalam rupiah saja, sedangkan pinjaman bank dalam valas dimasukkan dalam kategori pinjaman dalam valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya. Hutang hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal juga termasuk dalam kategori ini.

1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan nonfinansial baik pemerintah maupun swasta termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja

Lihat definisi 1211.

1222 Kredit Investasi

Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari perusahaan asuransi jiwa, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing

Mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak diperjualbelikan. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup hutang jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang obligasi tidak selalu dijamin oleh harta realnya. Kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas.

1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang pemerintah yang dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka panjang dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori surat berharga jangka panjang lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan bukan oleh pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan untuk kredit pemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh yayasan, perusahaan swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi non-jiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi asuransi jiwa dan dana pensiun, transaksi ini merupakan hutang perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi asuransi nonjiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi nonjiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa yang akan datang. Cadangan teknis pada asuransi nonjiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis berupa hutang-piutang antar pemasok dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka kredit dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 Rekening Antar Bank

Rekening antar bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk di sini rekening antar kantor, antar cabang dan kantor pusat, atau di antara cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivasnya) dan dimasukkan dalam kategori rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<https://www.bps.go.id>

Daftar Pustaka

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, W.I. National Income and Economic Accounting, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.
- Bank Indonesia, Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-Bank, Jakarta, 2000.
- Bank Indonesia, Tinjauan Triwulanan Perkembangan Ekonomi dan Moneter, Jakarta, 2003.
- _____, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, terbit bulanan.
- _____, Neraca Singkat Bank Indonesia 1988 - 1999, tidak dipublikasikan.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Guide to the Flow of Funds Accounts, Washington, D.C, 2000.
- Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operatin and Development, United Nations, and World Bank, System of National Accounts, Brussels/Lexembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.
- Departemen Keuangan, Laporan Kegiatan Usaha Peransuransian Indonesia, Jakarta, berbagai seri.
- Departemen Keuangan, Data Statistik Perusahaan Pembiayaan, Jakarta, berbagai seri.
- Departemen Keuangan, Laporan Tahunan Dana Pensiun, Jakarta, 2003.
- Perusahaan Umum Pegadaian, Laporan Keuangan 2002 dan 2003, tidak dipublikasikan.
- Badan Urusan Logistik, Laporan Keuangan 1995 dan 1996, tidak dipublikasikan.
- Biro Pusat Statistik, Studi Neraca Arus Indonesia 1980, Jakarta, 1987.
- _____, Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Pendapatan Nasional Indonesia Triwulanan, Jakarta, berbagai seri.
- Central Bank of the Philippines, The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983, Manila, 1985.
- _____, Flow of Funds Manual of Accounts, Manila, 1983.
- Copeland, M.A., A study of Money of Flows in the United States, New York, 1952.
- Dawson, J.C., Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.
- Geehan, Randy, An Analysis of the Indonesia Flow of Funds, Occational Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.
- Geehan, Saldua, and Balances, The Indonesian Flow of Funds, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., National Income and Flow of Funds Analysis, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

United Nations , Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, Handbook of National Accounting, Public Sector, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

Bank Indonesia, Laporan Tahunan, Jakarta 2003.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., Principles of money Banking and Financial Markets, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., Ekonomi (Terjemahan), Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

<https://www.bps.go.id>

Tabel-Tabel

<https://www.bps.go.id>

TABEL 2. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN						RUMAH TANGGA	
		OTORITAS MONETER		BANK		BUKAN BANK		P	S
		P	S	P	S	P	S	P	S
0100	Tabungan Bruto		16 437		76 144		978		#####
0200	Investasi Nonfinansial	189		7 830		1 076		23 642	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16 248		68 314		(98)		85 506	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16 248		68 314		(98)		85 506	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(19 164)		103 017		45 745		162 648	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(35 411)		34 703		45 843		77 142
0800	Cadangan Valas Pemerintah	24 878	6 141						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	160	5 805	1 973	(14 066)	(639)	57	138	12
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)		3 005	(9 435)	57 421	8 797		61 472	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas		(4 172)	(9 946)	(9 110)	(284)		(299)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		7 177	512	66 531	9 081		61 771	
1021	Uang Kertas dan Logam		14 328	472		(484)		13 546	
1022	Giro		(7 141)		25 352	3 133		6 669	
1023	Tabungan		(10)	1	50 658	2 730		48 850	
1024	Deposito Berjangka			39	(9 478)	3 701		(7 294)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya								
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi								
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			(2 186)	(2 225)	883	700	245	
1200	Kredit (Jumlah)	(513)	(822)	72 651	(3 012)	(206)	2 216	1 399	2 099
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(511)		70 942			990		(15)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(1 275)	368	(382)	1 399	
1230	Kredit dalam Valas	(1)	(822)	1 709	(1 737)	(574)	1 608		2 114
1300	Modal Saham dan Penyertaan	527	(0)	848	(224 075)	3 632	5 789	151 729	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(33 082)	(73 957)	(31 494)	4 093	14 087	2 648	21 747	
1410	Surat Berharga Pemerintah	(33 082)	(60 466)	(34 778)					
1420	Surat Berharga Lainnya	0	(13 491)	3 284	4 093	14 087	2 648	21 747	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	0	0	0	0	6 230	31 476	19 552	
1800	Kredit Dagang	0	0	0	0	6 988	810	2 900	5 347
2000	Rekening Antar Bank	(1 646)	36 477	33 351	(1 207)	0	0	0	0
9000	Rupa-rupa	(9 488)	(12 062)	37 308	217 775	5 973	2 147	(96 534)	69 684
	TOTAL	(18 974)	(18 974)	110 847	110 847	46 821	46 821	186 290	#####

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
2. Total penggunaan dan sumber untuk rekening antar bank (2000) perbedaan dalam jumlah yang sama dicerminkan pula oleh total
3. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

INDONESIA, 2003 (Miliar Rupiah)

SEKTOR BUKAN KEUANGAN						LUAR NEGERI		T O T A L		KODE NAD
PEMERINTAH		PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		P	S	P	S	
P	S	P	S	P	S					
	104 992		53 127		225 011		(70,366)		515 470	0100
82 562		82 651		317 520		0		515 471		0200
22 430		(29 524)		(92 509)		(70 366)		(0)		0300
(0)		0		0		0		(0)		0400
22 430		(29 525)		(92 509)		(70 366)		0		0500
(144 977)		99 626		331 978		(40 489)		538 384		0600
	(167 407)		129 151		424 487		29 877		538 384	0700
						6 141	24 878	31 019	31 019	0800
3 178	13	3	(398)	(13 512)	(6 959)	(9 010)	(2 172)	(17 709)	(17 708)	0900
(7 799)		14 955	15	(10 252)		(7 203)	(9 906)	50 535	50 536	1000
(3 800)		5 320		(6 170)		(8 049)	(9 946)	(23 228)	(23 228)	1010
(3 999)		9 634		(4 097)		846	41	73 748	73 749	1020
0		293		501				14 328	14 328	1021
(2 557)		2 020		8 648		297		18 211	18 210	1022
359				(2 013)		720		50 648	50 648	1023
(1 802)		7 322		(11 233)		(171)	41	(9 438)	(9 438)	1024
			15	15				15	15	1030
(417)	(1 350)	(2 710)	(108)	14 177	12 406	(2 178)	(1 610)	7 813	7 813	1100
(2 863)	(81)	539	(431)	(8 377)	60 895	(874)	445	61 757	61 309	1200
	44		(115)		68 346		733	70 431	69 983	1210
(1 642)		628	181	(2 446)		216		(1 477)	(1 476)	1220
(1 221)	(125)	(89)	(497)	(5 931)	(7 451)	(1 090)	(288)	(7 197)	(7 198)	1230
(185 576)			142 461	189 006	241 253	5 224	(39)	165 390	165 390	1300
(84 974)	(57 572)	(577)	5 899	10 426	30 044	14 906	(115)	(88 961)	(88 961)	1400
(60 466)	(57 572)			6 136		4 151		(118 039)	(118 039)	1410
(24 508)		(577)	5 899	4 290	30 044	10 755	(115)	29 078	29 078	1420
			996	6 690				32 472	32 472	1500
		1 645	17 288	18 580	6 668			30 113	30 113	1800
								31 705	35 270	2000
133 474	(108 417)	85 771	(36 571)	125 240	80 180	(47 495)	18 395	234 249	231 131	9000
(62 415)	(62 415)	182 278	182 278	649 498	649 498	(40 489)	(40 489)	1053 855	1053 855	

tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas moneter). Akibatnya penggunaan dan sumber untuk rupa-rupa (9000) pada posisi yang berlawanan

TABEL 1. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE NAD KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN						RUMAH TANGGA	
	OTORITAS MONETER		BANK		BUKAN BANK		P	S
	P	S	P	S	P	S	P	S
0100 Tabungan Bruto		(6 922)		10 643		2 302		107 941
0200 Investasi Nonfinansial	338		2 109		645		58 620	
0300 Pinjaman Neto = 0100-0200	(7 260)		8 534		1 657		49 321	
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0		0		0	
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(7 260)		8 534		1 657		49 321	
0600 Jumlah Penggunaan Finansial	28 982		26 635		23 753		76 393	
0700 Jumlah Sumber Finansial		36 242		18 101		22 096		27 072
0800 Cadangan Valas Pemerintah	(6 914)	(30 986)						
0900 Klaim dalam Valas Lainnya	(144)	3 028	(21 229)	4 855	618	66	(669)	(34)
1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	0	25 172	(1 909)	12 180	3 768		30 800	
1010 Uang & Simpanan dalam Valas		4 724	(4 702)	(33 696)	(1 260)		(3 169)	
1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah		20 448	2 793	45 876	5 028		33 969	
1021 Uang Kertas dan Logam		7 142	2 798		60		3 347	
1022 Giro		13 273		7 035	806		2 525	
1023 Tabungan		33		21 327	53		20 624	
1024 Deposito Berjangka			(5)	17 514	4 109		7 473	
1025 Simpanan Rupiah lainnya								
1030 Tabungan Giro Pos dan Koperasi								
1100 Surat Berharga Jangka Pendek			2 405	(1 436)	(710)	1 498	174	
1200 Kredit (Jumlah)	465	(2 646)	56 162	(19 427)	1 855	2 509	5 313	40 677
1210 Kredit Bank dalam Rupiah	470		69 626			2 782		35 040
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp				(1 582)	1 887	(245)	5 317	6 420
1230 Kredit dalam Valas	(4)	(2 646)	(13 464)	(17 845)	(32)	(28)	(4)	(783)
1300 Modal Saham dan Penyertaan	(12)		2 459	8 218	6 521	2 412	2 960	
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	28 687	27 595	(31 896)	(221)	1 885	2 005	5 026	
1410 Surat Berharga Pemerintah	28 687	28 687	(32 655)					
1420 Surat Berharga Lainnya		(1 092)	759	(221)	1 885	2 005	5 026	
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun					2 811	16 453	8 387	
1800 Kredit Dagang					2 541	1 201	(10 651)	1 885
2000 Rekening Antar Bank	(1 086)	13 456	15 592	(3 744)				
9000 Rupa-rupa	7 986	623	5 050	17 676	4 464	(4 048)	35 053	(15 456)
TOTAL	29 320	29 320	28 744	28 744	24 398	24 398	135 013	135 013

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
2. Total penggunaan dan sumber untuk rekening antar bank (2000) perbedaan dalam jumlah yang sama dicerminkan pula oleh total
3. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

INDONESIA, 2002 (Miliar Rupiah)

SEKTOR BUKAN KEUANGAN						LUAR NEGERI		T O T A L		KODE NAD
PEMERINTAH		PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		P	S	P	S	
P	S	P	S	P	S					
	77 030		80 862		178 276		(60,186)		389 947	0100
61 996		118 843		147 396				389 947		0200
15 034		(37 981)		30 880		(60 186)		0		0300
0		0		1		(0)		0		0400
15 034		(37 981)		30 879		(60 185)		(0)		0500
32 104		(8 567)		45 746		148 044		373 091		0600
	17 070		29 415		14 866		208 229		373 091	0700
						(30 986)	(6 914)	(37 900)	(37 900)	0800
65	(12)		694	(8 418)	(5 685)	16 662	(16 025)	(13 115)	(13 113)	0900
24 040		(4 259)		802	7	(20 585)	(4 701)	32 658	32 658	1000
7 814		1 679		(13 337)		(20 698)	(4 702)	(33 673)	(33 674)	1010
16 226		(5 938)	0	14 139	0	113	1	66 324	66 325	1020
		951		(15)				7 141	7 142	1021
16 132		(8 426)		8 438		833		20 308	20 308	1022
58		16		436		173		21 360	21 360	1023
36		1 521		5 273		(893)	1	17 515	17 515	1024
				7	7			7	7	1030
418	840	1 880	1 462	7 327	6 715	(2 080)	335	9 414	9 414	1100
(3 803)	(2 367)	(9 012)	8 136	169	17 161	(8 825)	(1 720)	42 323	42 323	1200
	(1 498)		6 185		27 617		(31)	70 095	70 095	1210
1 875		(4 031)	1 594	73		1 066		6 187	6 187	1220
(5 678)	(869)	(4 981)	357	96	(10 456)	(9 891)	(1 689)	(33 960)	(33 959)	1230
5 274			10 777	3 647	11 322	12 187	309	33 036	33 038	1300
28 687	(20 921)	1 451	2 416	3 556	6 535	(18 526)	1 460	18 870	18 869	1400
28 687	(20 921)					(16 953)		7 766	7 766	1410
		1 451	2 416	3 556	6 535	(1 573)	1 460	11 104	11 103	1420
			35	5 290				16 488	16 488	1500
		8 028	2 471	8 290	2 651			8 208	8 208	1800
								14 506	9 712	2000
(22 577)	39 530	(6 654)	3 424	25 082	(23 840)	200 198	235 485	248 603	253 394	9000
94 100	94 100	110 277	110 277	193 142	193 142	148 044	148 044	763 038	763 038	

tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas moneter). Akibatnya penggunaan dan sumber untuk rupa-rupa (9000) pada posisi yang berlawanan

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE NAD KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN							
	OTORITAS MONETER		BANK		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA	
	P	S	P	S	P	S	P	S
0100 Tabungan Bruto		17,138		45,511		10,801		191,768
0200 Investasi Nonfinansial	556		4,314		1,036		33,425	
0300 Pinjaman Neto = 0100-0200	16,582		41,197		9,764		158,343	
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0		0	
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,582		41,197		9,764		158,343	
0600 Jumlah Penggunaan Finansial	30,845		196,786		53,834		257,427	
0700 Jumlah Sumber Finansial		14,262		155,589		44,070		99,084
0800 Cadangan Valas Pemerintah	4,090							
0900 Klaim dalam Valas Lainnya	(997)		691	(438)	(13)	53		63
1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	(1,220)	19,329	50,122	170,954	6,826		120,784	
1010 Uang & Simpanan dalam Valas	(1,220)	3,206	46,980	54,810	1,210		19,859	
1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah		16,123	3,142	116,144	5,616		75,125	
1021 Uang Kertas dan Logam		17,975	3,003	-	749		5,989	
1022 Giro		(1,895)	(0)	22,950	(672)		(684)	
1023 Tabungan		43		(13,892)	227		(15,265)	
1024 Deposito Berjangka				107,041	5,295		85,059	
1025 Simpanan Rupiah lainnya			139	45	16		26	
1030 Tabungan Giro Pos & Koperasi							25,800	
1100 Surat Berharga Jangka Pendek		-	5,116	(211)	422	418	178	
1200 Kredit (Jumlah)	(13,715)	(4,491)	144,974	5,148	1,672	15,127	68	85,828
1210 Kredit Bank dalam Rupiah	(13,716)		134,594			4,992		86,840
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp				2,929	1,753	1,549	68	(835)
1230 Kredit dalam Valas	2	(4,491)	10,380	2,219	(80)	8,586		(176)
1300 Modal Saham dan Penyertaan	(0)	(79)	(65)	3,806	3,633	1,132	50,211	
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	20,322	7,139	(1,107)	790	17,760	3,900	13,200	
1410 Surat Berharga Pemerintah	20,322	8,582	(806)		11,043		(1,850)	
1420 Surat Berharga Lainnya		(1,443)	(301)	790	6,717	3,900	15,050	
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun					1,383	17,329	16,106	
1800 Kredit Dagang					13,493	8,854	6,477	10,197
2000 Rekening Antar Bank	(722)	11,536	4,839	3,658	4,149	(24)	4,237	
9000 Rupa-rupa	23,086	(19,172)	(7,784)	(28,119)	4,509	(2,720)	46,167	2,995
TOTAL	31,400	31,400	201,100	201,100	54,871	54,871	290,852	290,852

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

INDONESIA 2005 (Miliar Rupiah)*

SEKTOR BUKAN KEUANGAN						LUAR NEGERI		T O T A L		KODE NAD
PEMERINTAH		PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		P	S	P	S	
P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
	108,813		3,833		432,804		(71,942)		738,726	0100
90,213		70,456		538,726				738,726		0200
18,600		(66,623)		(105,922)		(71,942)		(0)		0300
(0)		(0)						0		0400
18,600		(66,623)		(105,922)		(71,942)		(1)		0500
55,067		73,375		146,802		14,409		828,545		0600
	36,467		139,998		252,724		86,351		828,545	0700
							4,090	4,090	4,090	0800
97	(69)			10,188	16,386	14,861	8,831	24,827	24,827	0900
32,275		15,646		41,914	25,800	3,679	53,941	270,025	270,025	1000
3,443		8,586		30,144		2,817	53,802	111,818	111,818	1010
28,832		7,060		11,770		862	139	132,407	132,407	1020
749		1,497		5,989				17,975	17,975	1021
22,395		(741)		(918)		1,676		21,055	21,055	1022
388		(139)		838		102		(13,849)	(13,849)	1023
4,623		6,558		5,757		(251)		107,041	107,041	1024
678		(115)		103		(664)	139	184	184	
					25,800			25,800	25,800	1030
(8)		1,255	(5)	2,142	11,010	8,438	6,330	17,543	17,543	1100
(689)	(31,712)	27	3,916	(109)	32,643	(24,494)	1,275	107,734	107,734	1200
	(12,734)		2,637		38,845		299	120,878	120,878	1210
(385)		27	58	(1,209)	(732)	2,716		2,969	2,969	1220
(304)	(18,977)		1,221	1,100	(5,470)	(27,210)	975	(16,114)	(16,114)	1230
(7,934)		19,221	44,239	56,234	113,259	41,236	179	162,536	162,536	1300
7,213	13,598	1,715	3,637	(15,258)	46,558	33,701	1,924	77,546	77,546	1400
8,582	13,598	(192)		(35,265)		20,345		22,180	22,180	1410
(1,369)		1,907	3,637	20,007	46,558	13,355	1,924	55,366	55,366	1420
			590	430				17,919	17,919	1500
		7,782	21,183	12,483	1,392	1,392		41,627	41,627	1800
				(4,201)	24	6,892		15,195	15,195	2000
24,113	54,649	27,729	66,438	42,979	5,652	(71,295)	9,781	89,504	89,505	9000
145,280	145,280	143,831	143,831	685,528	685,528	14,409	14,409	1,567,271	1,567,271	

TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN						RUMAH TANGGA	
		OTORITAS MONETER		BANK		BUKAN BANK		P	S
		P	S	P	S	P	S	P	S
0100	Tabungan Bruto		20 486		50 105		3 460		138 612
0200	Investasi Nonfinansial	(196)		3 147		316		74 321	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	20 681		46 958		3 145		64 291	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	20 681		46 958		3 145		64 291	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	51 254		52 435		45 745		123 493	
0700	Jumlah Sumber Finansial		30 572		5 477		42 600		59 202
0800	Cadangan Valas Pemerintah	27 891							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	149		(23 294)	13 632	(3)	(93)		19
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	2 283	(19 066)	(9 739)	67 809	2 544		95 156	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	2 283	(17 974)	(9 210)	(817)			(6 122)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	0	(1 092)	(529)	68 626	2 544		101 278	
1021	Uang Kertas dan Logam		14 161	(534)		116		40 081	
1022	Giro		(15 217)	(0)	17 560	114		4 318	
1023	Tabungan		(36)		53 590	73		54 341	
1024	Deposito Berjangka			(42)	(2 444)	2 241		2 538	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			47	(80)				
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi								
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			5 642	5 880	(373)	(132)	298	
1200	Kredit (Jumlah)	7 192	1 251	116 409	3 737	694	21 752	8 193	78 696
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	7 189		96 934			6 899		67 063
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	0			1 477	686	3 572	8 193	11 364
1230	Kredit dalam Valas	2	1 251	19 475	2 260	8	11 281		269
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(4)	441	283	(31 856)	4 475	5 857	52 251	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	7 267	5 780	(36 326)	1 977	31 564	4 954	(381)	
1410	Surat Berharga Pemerintah	7 267	34 140	(34 663)		22 989			
1420	Surat Berharga Lainnya		(28 360)	(1 662)	1 977	8 575	4 954	(381)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					156	17 425	10 271	
1800	Kredit Dagang					17 844	1 346	9 372	5 829
2000	Rekening Antar Bank	(4 362)	32 747	33 723	(3 386)	0	0		
9000	Rupa-rupa	10 839	9 419	(34 265)	(52 315)	6 502	(8 509)	(51 666)	(25 342)
	TOTAL	51 058	51 058	55 582	55 582	46 061	46 061	197 814	197 814

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
2. Total penggunaan dan sumber untuk rekening antar bank (2000) perbedaan dalam jumlah yang sama dicerminkan pula oleh total
3. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

INDONESIA, 2004 (Miliar Rupiah)

SEKTOR BUKAN KEUANGAN						LUAR NEGERI		T O T A L		KODE NAD
PEMERINTAH		PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		P	S	P	S	
P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
	101 857		83 933		181 223		(27 383)		552 292	0100
76 437		147 622		250 645				552 292		0200
25 420		(63 689)		(69 423)		(27 383)		0		0300
0		(0)		(0)		(0)		(0)		0400
25 420		(63 689)		(69 422)		(27 383)		1		0500
48 284		(22 835)		255 579		103 862		657 816		0600
	22 864		40 854		325 001		131 244		657 816	0700
							27 891	27 891	27 891	0800
1 659	72			1 824	(702)	12 864	(19 728)	(6 800)	(6 800)	0900
(21 112)		16 617	15	(33 102)		(2 276)	1 614	50 373	50 372	1000
(12 154)		5 467		554		2 000	1 610	(17 181)	(17 181)	1010
(8 958)		11 150		(33 671)		(4 275)	4	67 539	67 539	1020
		502		(26 004)				14 161	14 161	1021
(7 583)		2 327		6 705		(3 538)	(0)	2 343	2 343	1022
(23)				83		(921)		53 554	53 554	1023
(1 657)		8 322		(13 456)		(432)	(42)	(2 486)	(2 486)	1024
304				(999)		615	47	(33)	(33)	1025
			15	15				15	15	1030
(3 352)	(419)	(3 145)	881	3 950	5 829	8 978	(41)	11 998	11 998	1100
67	50 490	732	1 169	3 827	111 125	127 535	(3 581)	264 648	264 640	1200
	(1 491)		(125)		32 609	0	(832)	104 124	104 124	1210
831		732	201	6 147		26	0	16 614	16 614	1220
(764)	51 981		1 093	(2 320)	78 516	127 510	(2 749)	143 911	143 902	1230
(37 041)			20 781	162 830	222 581	36 705	1 695	219 500	219 499	1300
5 586	(25 356)	(623)	0	(17 338)	17 414	14 558	(461)	4 308	4 308	1400
34 140	(25 356)			(34 914)		13 965		8 783	8 783	1410
(28 554)		(623)		17 576	17 414	593	(461)	(4 476)	(4 475)	1420
			1 084	8 082				18 509	18 509	1500
		1 645	24 800	12 789	11 390	1 714		43 365	43 365	1800
						0		29 361	29 361	2000
102 477	(1 923)	(38 061)	(7 876)	112 717	(42 636)	(96 219)	123 855	12 324	(5 328)	9000
124 721	124 721	124 787	124 787	506 224	506 224	103 862	103 861	1210 108	1210 108	

tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas moneter). Akibatnya penggunaan dan sumber untuk rupa-rupa (9000) pada posisi yang berlawanan

TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN						RUMAH TANGGA	
		OTORITAS MONETER		BANK		BUKAN BANK		P	S
		P	S	P	S	P	S	P	S
0100	Tabungan Bruto		(15,432)		24,690		19,386		241,342
0200	Investasi Nonfinansial	283		2,876		199		161,772	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(15,715)		21,814		19,187		79,571	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500								
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(15,715)		21,814		19,187			
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	194,331		298,047		95,082		484,081	
0700	Jumlah Sumber Finansial		210,046		276,233		75,895		404,510
0800	Cadangan Valas Pemerintah	157,378							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	121		3,162	637	0	149		108
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(4,543)	43,289	(9,249)	232,504	4,766		126,026	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(4,543)	(4,626)	(20,110)	35,276	2,475		3,844	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		47,914	10,861	197,229	2,291		122,182	
1021	Uang Kertas dan Logam		42,213	9,900		1,616		12,925	
1022	Giro		5,698		59,407	2,694		8,679	
1023	Tabungan		3		102,057	(393)		104,291	
1024	Deposito Berjangka				33,079	(1,625)		(3,892)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			960	2,686	(1)		179	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi								
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1,751	9,861	221	(111)	(571)	
1200	Kredit (Jumlah)	(11,518)	(62)	209,819	5,767	17,110	9,658	15,011	96,985
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(11,519)		155,013		14,398	3,389		97,727
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				1,527	2,629	(15)	15,012	
1230	Kredit dalam Valas	1	(62)	54,806	4,239	83	6,283	(1)	(742)
1300	Modal Saham dan Penyertaan		288	(255)	9,746	38,813	5,255	44,806	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(7,860)	5,061	3,289	3,076	23,739	3,966	10,930	
1410	Surat Berharga Pemerintah	(7,860)		(464)		13,904			
1420	Surat Berharga Lainnya		5,061	3,753	3,076	9,835	3,966	10,930	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					389	47,426	5,747	
1800	Kredit Dagang					1,533	(2)	43,033	45,846
2000	Rekening Antar Bank	(1,642)	87,668	80,719	4,409	1,192	30	158	
9000	Rupa-rupa	62,395	73,803	8,811	10,234	7,318	9,523	238,941	261,572
	TOTAL	194,614	194,614	300,924	300,924	95,281	95,281	645,852	645,852

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
2. Total penggunaan dan sumber untuk rekening antar bank (2000) perbedaan dalam jumlah yang sama dicerminkan pula oleh total
3. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

INDONESIA 2007 (MILIAR RUPIAH)**)

SEKTOR BUKAN KEUANGAN						LUAR NEGERI		T O T A L		FOF CODE
PEMERINTAH		PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		P	S	P	S	
P	S	P	S	P	S					
	179,123		40,594		497,178		(2,882)		984,001	0100
123,886		75,508		619,477				984,001		0200
55,238		(34,914)		(122,298)		(2,882)		(79,571)		0300
						0		0		0400
55,238		(34,914)		(122,298)		(2,882)		(79,571)		0500
(818)		106,512		903,455		224,987		2,305,677		0600
	(56,056)		141,426		1,025,754		227,869		2,305,677	0700
							157,378	157,378	157,378	0800
			0	12,732	16,578	17,315	15,858	33,330	33,330	0900
(8,408)		27,513		116,379		6,572	(16,737)	259,056	259,056	1000
(4,788)		2,235		30,914		2,924	(17,698)	12,953	12,953	1010
(3,620)		25,278		85,464		3,648	960	246,103	246,103	1020
1,616		3,231		12,925				42,213	42,213	1021
(7,211)		17,849		40,174		2,921		65,105	65,105	1022
(773)		(349)		(91)		(625)		102,060	102,060	1023
2,288		4,074		31,117		1,117		33,079	33,079	1024
461		473		1,340		235	960	3,646	3,646	1030
14	(0)	271	632	2,116	14,410	17,320	(3,670)	21,123	21,123	1100
38	20,824	187	12,140	1,793	279,188	193,139	1,079	425,579	425,579	1200
371	(6,784)		(488)	148	64,822		(256)	158,411	158,411	1210
(299)		187	1,396	634	16,848	1,594		19,757	19,757	1220
(34)	27,607		11,232	1,010	197,518	191,544	1,335	247,410	247,410	1230
(169)			101,356	542,966	641,936	132,278	(142)	758,438	758,438	1300
5,020	59,251	2,887	1,960	5,913	5,539	32,180	(2,755)	76,098	76,098	1400
	59,251			15,004		38,666		59,251	59,251	1410
5,020		2,887	1,960	(9,091)	5,539	(6,485)	(2,755)	16,847	16,847	1420
			2,688	43,979				50,114	50,114	1500
		2,830	11,518	82,352	63,083	3,208	12,512	132,956	132,956	1800
				1,769		9,912		92,107	92,107	2000
2,687	(136,130)	72,824	11,131	93,457	5,019	(186,937)	64,346	299,498	299,498	9000
123,068	123,068	182,020	182,020	1,522,932	1,522,932	224,987	224,987	3,289,677	3,289,677	

tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas moneter). Akibatnya penggunaan dan sumber untuk rupa-rupa (9000) pada posisi yang berlawanan

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE NAD KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN							
	OTORITAS MONETER		BANK		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA	
	P	S	P	S	P	S	P	S
0100 Tabungan Bruto		17,256		27,613		8,815		180,262
0200 Investasi Nonfinansial	243		2,891		1,567		31,417	
0300 Pinjaman Neto = 0100-0200	17 013		24 722		7 249		148 845	
0400 Selisih Statistik = 0300-0500	0		0		7 347		0	
0500 Inv. Finansial Neto=0600-0700	17 013		24 722		(98)		148 845	
0600 Jumlah Penggunaan Finansial	126 964		229 329		30 887		237 046	
0700 Jumlah Sumber Finansial		109 951		204 607		23 638		88 201
0800 Cadangan Valas Pemerintah	29,423							
0900 Klaim dalam Valas Lainnya	(729)		(6,295)	(5,711)	(25)	98		(70)
1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	13,228	(76,335)	(14,690)	161,175	12,470		84,189	
1010 Uang & Simpanan dalam Valas	13,228	(8,458)	(21,812)	(4,746)	(730)		(5,526)	
1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah		(67,876)	7,122	165,921	13,200		80,522	
1021 Uang Kertas dan Logam		33,703	7,031		1,334		10,669	
1022 Giro		(101,324)	(1)	57,241	1,016		9,362	
1023 Tabungan		(256)		52,904	372		43,461	
1024 Deposito Berjangka				55,261	10,522		17,021	
1025 Simpanan Rupiah lainnya			92	515	(43)		9	
1030 Tabungan Giro Pos & Koperasi							9,193	
1100 Surat Berharga Jangka Pendek			2,127	6,282	35	(409)	126	
1200 Kredit (Jumlah)	(156)	(5,834)	99,969	(608)	(123)	6,636	(57)	65,197
1210 Kredit Bank dalam Rupiah	(154)		75,599			5,441		64,781
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp				(2,550)	(123)	1,321	(57)	(1,547)
1230 Kredit dalam Valas	(2)	(5,834)	24,370	1,942		(126)	(0)	1,963
1300 Modal Saham dan Penyertaan	44	(117)	(106)	8,694	(136)	3,643	34,824	(200)
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	11,810	13,626	(9,721)	1,828	4,689	(8)	1	
1410 Surat Berharga Pemerintah	11,810	14,349	(11,505)		3,567			
1420 Surat Berharga Lainnya		(724)	1,784	1,828	1,122	(8)	1	
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun					4,363	20,976	16,813	
1800 Kredit Dagang					29,784	(5,904)	19,259	21,787
2000 Rekening Antar Bank	167	142,713	156,564	22,045	7,672	13	51	
9000 Rupa-rupa	73,178	35,898	1,481	10,902	(27,841)	(1,406)	81,839	1,487
TOTAL	127,207	127,207	232,220	232,220	32,454	32,454	268,463	268,463

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

INDONESIA 2006 (Miliar Rupiah*)

SEKTOR BUKAN KEUANGAN						LUAR NEGERI		T O T A L		KODE NAD
PEMERINTAH		PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		P	S	P	S	
P	S	P	S	P	S					
	181,082		3,708		467,577		(38,460)		847 853	0100
113,721		78,006		620,008				847 853		0200
67 361		(74 298)		(152 431)		(38 460)				0300
0		0		0		0		7 347		0400
67 361		(74 298)		(152 431)		(38 460)		(7 347)		0500
98 784		12 952		323 518		44 642		1104 121		0600
	31 423		87 250		475 949		83 101		1104 121	0700
							29,423	29,423	29,423	0800
(184)	64			(51,331)	(58,753)	(23,089)	(17,280)	(81,653)	(81,653)	0900
2,425		11,642		53,085	9,193	(76,257)	(7,943)	86,091	86,091	1000
(11,033)		5,683		(1,514)		466	(8,034)	(21,238)	(21,238)	1010
13,458		5,959		54,599		(76,724)	91	98,136	98,136	1020
1,334		2,667		10,669				33,703	33,703	1021
1,419		155		20,647		(76,682)	(1)	(44,083)	(44,083)	1022
1,508		1,148		5,643		517		52,648	52,648	1023
8,931		2,012		17,327		(551)		55,261	55,261	1024
266		(24)		314		(7)	92	607	607	
				-	9,193			9,193	9,193	1030
	(0)	49	(275)	(3,110)	(1,205)	2,205	(2,962)	1,431	1,431	1100
506	(67,241)	(59)	10,564	1,441	(94,598)	(185,876)	1,531	(84,355)	(84,353)	1200
	898		2,876	-	943		506	75,445	75,445	1210
321		(59)	(30)	456	256	(3,091)		(2,553)	(2,550)	1220
185	(68,139)		7,718	985	(95,797)	(182,786)	1,026	(157,248)	(157,248)	1230
5,680		7,670	65,774	464,912	519,376	79,044	(5,240)	591,932	591,932	1300
15,917	32,284	583	40	11,946	16,275	25,991	(2,827)	61,217	61,217	1400
14,349	32,284	(472)		17,638		11,246		46,633	46,633	1410
1,568		1,055	40	(5,691)	16,275	14,745	(2,827)	14,584	14,584	1420
			600	400				21,576	21,576	1500
		5,762	8,077	58,352	59,344	2,331	32,183	115,488	115,488	1800
				(2,978)		3,297		164,772	164,772	2000
74,440	66,316	(12,694)	2,469	(209,201)	26,316	216,997	56,215	179,159	179,156	9000
212,505	212,505	90,958	90,958	943,526	943,526	44,642	44,642	1,951,973	1,951,973	

TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		10 643		76 144		50 105
0200	Investasi Nonfinansial	2 109		7 830		3 147	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	8 534		68 314		46 958	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	8 534		68 314		46 958	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	26 635		103 017		52 435	
0700	Jumlah Sumber Finansial		18 101		34 703		5 477
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(21 229)	4 855	1 973	(14 066)	(23 294)	13 632
	1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	(1 909)	12 180	(9 435)	57 421	(9 739)	67 809
	1010 Uang & Simpanan dalam Valas	(4 702)	(33 696)	(9 946)	(9 110)	(9 210)	(817)
	1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah	2 793	45 876	512	66 531	(529)	68 626
	1021 Uang Kertas dan Logam	2 798		472		(534)	
	1022 Giro		7 035		25 352	(0)	17 560
	1023 Tabungan		21 327	1	50 658		53 590
	1024 Deposito Berjangka	(5)	17 514	39	(9 478)	(42)	(2 444)
	1025 Simpanan Rupiah lainnya					47	(80)
	1030 Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
	1100 Surat Berharga Jangka Pendek	2 405	(1 436)	(2 186)	(2 225)	5 642	5 880
	1200 Kredit (Jumlah)	56 162	(19 427)	72 651	(3 012)	116 409	3 737
	1210 Kredit Bank dalam Rupiah	69 626		70 942		96 934	
	1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp		(1 582)		(1 275)		1 477
	1230 Kredit dalam Valas	(13 464)	(17 845)	1 709	(1 737)	19 475	2 260
	1300 Modal Saham dan Penyertaan	2 459	8 218	848	(224 075)	283	(31 856)
	1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(31 896)	(221)	(31 494)	4 093	(36 326)	1 977
	1410 Surat Berharga Pemerintah	(32 655)		(34 778)		(34 663)	
	1420 Surat Berharga Lainnya	759	(221)	3 284	4 093	(1 662)	1 977
	1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun						
	1800 Kredit Dagang						
	2000 Rekening Antar Bank	15 592	(3 744)	33 351	(1 207)	33 723	(3 386)
	9000 Rupa-rupa	5 050	17 676	37 308	217 775	(34 265)	(52 315)
	JUMLAH	28 744	28 744	110 847	110 847	55 582	55 582

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

**INDONESIA SEKTOR BPUG
OF INDONESIA FOR DEPOSITS MONEY BANKS
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)**

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	45,511		27 613		24,690	0100	Gross Saving
4,314		2 891		2,876		0200	Non Financial Investment
41,197		24 722		21,814		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
0						0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
41,197		24 722		21,814		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
196,786		229 329		298,047		0600	Total Financial Uses
	155,589		204 607		276,233	0700	Total Financial Sources
						0800	Official Foreign Exchange Reserve
691	(438)	(6 295)	(5 711)	3,162	637	0900	Other Foreign Claims
50,122	170,954	(14 690)	161 175	(9,249)	232,504	1000	Currency and Deposits (Total)
46,980	54,810	(21 812)	(4 746)	(20,110)	35,276	1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
3,142	116,144	7 122	165 921	10,861	197,229	1020	Rupiah Currency and Deposits
3,003	-	7 031		9,900		1021	Currency and Coin
(0)	22,950	(1)	57 241		59,407	1022	Demand Deposits
	(13,892)		52 904		102,057	1023	Saving Deposits
	107,041		55 261		33,079	1024	Time Deposits
139	45	92	515	960	2,686		Other Rupiah Deposits
						1030	Postal and Cooperation Deposits
5,116	(211)	2 127	6 282	1,751	9,861	1100	Short Term Securities
144,974	5,148	99 969	(608)	209,819	5,767	1200	Credit (Total)
134,594		75 599		155,013		1210	Bank Loans in Rupiah
	2,929		(2 550)		1,527	1220	Other Institutions Loan in Rupiah
10,380	2,219	24 370	1 942	54,806	4,239	1230	Loans in Foreign Currency
(65)	3,806	(106)	8 694	(255)	9,746	1300	Stock and Participation
(1,107)	790	(9 721)	1 828	3,289	3,076	1400	Long Term Securities (Total)
(806)		(11 505)	0	(464)		1410	Government Bonds
(301)	790	1 784	1 828	3,753	3,076	1420	Other Bonds and Debentures
						1500	Life Insurance and Pension Reserve
						1800	Trade Credits
4,839	3,658	156 564	22 045	80,719	4,409	2000	Interbank Claims
(7,784)	(28,119)	1 481	10 902	8,811	10,234	9000	Miscellaneous Accounts
201,100	201,100	232 220	232 220	300,924	300,924		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P U	S S	P U	S S	P U	S S
0100	Tabungan Bruto		(6 922)		16 437		20 486
0200	Investasi Nonfinansial	338		189		(196)	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(7 260)		16 248		20 681	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(7 260)		16 248		20 681	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	28 982		(19 164)		51 254	
0700	Jumlah Sumber Finansial		36 242		(35 411)		30 572
0800	Cadangan Valas Pemerintah	(6 914)	(30 986)	24 878	6 141	27 891	
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(144)	3 028	160	5 805	149	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	0	25 172		3 005	2 283	(19 066)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas		4 724		(4 172)	2 283	(17 974)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		20 448		7 177	0	(1 092)
1021	Uang Kertas dan Logam		7 142		14 328		14 161
1022	Giro		13 273		(7 141)		(15 217)
1023	Tabungan		33		(10)		(36)
1024	Deposito Berjangka						
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek						
1200	Kredit (Jumlah)	466	(2 646)	(513)	(822)	7 192	1 251
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	470		(511)		7 189	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp					0	
1230	Kredit dalam Valas	(4)	(2 646)	(1)	(822)	2	1 251
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(12)		527	(0)	(4)	441
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	28 687	27 595	(33 082)	(73 957)	7 267	5 780
1410	Surat Berharga Pemerintah	28 687	28 687	(33 082)	(60 466)	7 267	34 140
1420	Surat Berharga Lainnya		(1 092)		(13 491)		(28 360)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	(1 086)	13 456	(1 646)	36 477	(4 362)	32 747
9000	Rupa-rupa	7 986	623	(9 488)	(12 062)	10 839	9 419
	JUMLAH	29 320	29 320	(18 974)	(18 974)	51 058	51 058

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
 2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan
- *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

**INDONESIA SEKTOR BANK SENTRAL
OF INDONESIA FOR CENTRAL BANK
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)**

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	17,138		17,256		(15,432)	0100	Gross Saving
556		243		283		0200	Non Financial Investment
16,582		17 013		(15,715)		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
0		0				0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
16,582		17 013		(15,715)		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
30,845		126 964		194,331		0600	Total Financial Uses
	14,262		109 951		210,046	0700	Total Financial Sources
4,090		29,423		157,378		0800	Official Foreign Exchange Reserve
(997)		(729)		121		0900	Other Foreign Claims
(1,220)	19,329	13,228	(76,335)	(4,543)	43,289	1000	Currency and Deposits (Total)
(1,220)	3,206	13,228	(8,458)	(4,543)	(4,626)	1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
	16,123		(67,876)		47,914	1020	Rupiah Currency and Deposits
	17,975		33,703		42,213	1021	Currency and Coin
	(1,895)		(101,324)		5,698	1022	Demand Deposits
	43		(256)		3	1023	Saving Deposits
						1024	Time Deposits
							Other Rupiah Deposits
						1030	Postal and Cooperation Deposits
	-					1100	Short Term Securities
(13,715)	(4,491)	(156)	(5,834)	(11,518)	(62)	1200	Credit (Total)
(13,716)		(154)		(11,519)		1210	Bank Loans in Rupiah
						1220	Other Institutions Loan in Rupiah
2	(4,491)	(2)	(5,834)	1	(62)	1230	Loans in Foreign Currency
(0)	(79)	44	(117)		288	1300	Stock and Participation
20,322	7,139	11,810	13,626	(7,860)	5,061	1400	Long Term Securities (Total)
20,322	8,582	11,810	14,349	(7,860)		1410	Government Bonds
	(1,443)		(724)		5,061	1420	Other Bonds and Debentures
						1500	Life Insurance and Pension Reserve
						1800	Trade Credits
(722)	11,536	167	142,713	(1,642)	87,668	2000	Interbank Claims
23,086	(19,172)	73,178	35,898	62,395	73,803	9000	Miscellaneous Accounts
31,400	31,400	127 207	127 207	194,614	194,614		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
 2. The total may be not equal due to rounding
- *) Preliminary Figures
**) Very Preliminary Figures

TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		107 941		109 148		138 612
0200	Investasi Nonfinansial	58 620		23 642		74 321	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	49 321		85 506		64 291	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		(0)		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	49 321		85 506		64 291	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	76 393		162 648		123 493	
0700	Jumlah Sumber Finansial		27 072		77 142		59 202
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(669)	(34)	138	12		19
	1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	30 800		61 472		95 156	
	1010 Uang & Simpanan dalam Valas	(3 169)		(299)		(6 122)	
	1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah	33 969		61 771		101 278	
	1021 Uang Kertas dan Logam	3 347		13 546		40 081	
	1022 Giro	2 525		6 669		4 318	
	1023 Tabungan	20 624		48 850		54 341	
	1024 Deposito Berjangka	7 473		(7 294)		2 538	
	1025 Simpanan Rupiah lainnya						
	1030 Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
	1100 Surat Berharga Jangka Pendek	174		245		298	
	1200 Kredit (Jumlah)	5 313	40 677	1 399	2 099	8 193	78 696
	1210 Kredit Bank dalam Rupiah		35 040		(15)		67 063
	1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp	5 317	6 420	1 399		8 193	11 364
	1230 Kredit dalam Valas	(4)	(783)		2 114		269
	1300 Modal Saham dan Penyertaan	2 960		151 729		52 251	
	1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	5 026		21 747		(381)	
	1410 Surat Berharga Pemerintah						
	1420 Surat Berharga Lainnya	5 026		21 747		(381)	
	1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun	8 387		19 552		10 271	
	1800 Kredit Dagang	(10 651)	1 885	2 900	5 347	9 372	5 829
	2000 Rekening Antar Bank			0	0		
	9000 Rupa-rupa	35 053	(15 456)	(96 534)	69 684	(51 666)	(25 342)
	JUMLAH	135 013	135 013	186 290	186 290	197 814	197 814

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

INDONESIA SEKTOR RUMAH TANGGA
OF INDONESIA FOR HOUSEHOLD
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	191,768		180 262		241,342	0100	Gross Saving
33,425		31 417		161,772		0200	Non Financial Investment
158,343		148 845		79,571		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
0						0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
158,343		148 845				0500	Net Financial Investment = 0600-0700
257,427		237 046		484,081		0600	Total Financial Uses
	99,084		88 201		404,510	0700	Total Financial Sources
	63		(70)		108	0800	Official Foreign Exchange Reserve
						0900	Other Foreign Claims
120,784		84 189		126,026		1000	Currency and Deposits (Total)
19,859		(5 526)		3,844		1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
75,125		80 522		122,182		1020	Rupiah Currency and Deposits
5,989		10 669		12,925		1021	Currency and Coin
(684)		9 362		8,679		1022	Demand Deposits
(15,265)		43 461		104,291		1023	Saving Deposits
85,059		17 021		(3,892)		1024	Time Deposits
26		9		179			Other Rupiah Deposits
25,800		9 193				1030	Postal and Cooperation Deposits
178		126		(571)		1100	Short Term Securities
68	85,828	(57)	65 197	15,011	96,985	1200	Credit (Total)
	86,840		64 781		97,727	1210	Bank Loans in Rupiah
68	(835)	(57)	(1 547)	15,012		1220	Other Institutions Loan in Rupiah
	(176)		1 963	(1)	(742)	1230	Loans in Foreign Currency
50,211		34 824	(200)	44,806		1300	Stock and Participation
13,200		1		10,930		1400	Long Term Securities (Total)
(1,850)						1410	Government Bonds
15,050		1		10,930		1420	Other Bonds and Debentures
16,106		16 813		5,747		1500	Life Insurance and Pension Reserve
6,477	10,197	19 259	21 787	43,033	45,846	1800	Trade Credits
4,237		51		158		2000	Interbank Claims
46,167	2,995	81 839	1 487	238,941	261,572	9000	Miscellaneous Accounts
290,852	290,852	268 463	268 463	645,852	645,852		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		2 302		978		3 460
0200	Investasi Nonfinansial	645		1 076		316	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	1 657		(98)		3 145	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	1 657		(98)		3 145	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	23 753		45 745		45 745	
0700	Jumlah Sumber Finansial		22 096		45 843		42 600
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	618	66	(639)	57	(3)	(93)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	3 768		8 797		2 544	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1 260)		(284)			
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	5 028		9 081		2 544	
1021	Uang Kertas dan Logam	60		(484)		116	
1022	Giro	806		3 133		114	
1023	Tabungan	53		2 730		73	
1024	Deposito Berjangka	4 109		3 701		2 241	
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(710)	1 498	883	700	(373)	(132)
1200	Kredit (Jumlah)	1 855	2 509	(206)	2 216	694	21 752
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		2 782		990		6 899
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	1 887	(245)	368	(382)	686	3 572
1230	Kredit dalam Valas	(32)	(28)	(574)	1 608	8	11 281
1300	Modal Saham dan Penyertaan	6 521	2 412	3 632	5 789	4 475	5 857
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	1 885	2 005	14 087	2 648	31 564	4 954
1410	Surat Berharga Pemerintah					22 989	
1420	Surat Berharga Lainnya	1 885	2 005	14 087	2 648	8 575	4 954
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	2 811	16 453	6 230	31 476	156	17 425
1800	Kredit Dagang	2 541	1 201	6 988	810	17 844	1 346
2000	Rekening Antar Bank					0	0
9000	Rupa-rupa	4 464	(4 048)	5 973	2 147	6 502	(8 509)
	JUMLAH	24 398	24 398	46 821	46 821	46 061	46 061

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

INDONESIA SEKTOR BUKAN BANK
OF INDONESIA FOR NON BANKS SECTORS
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	10,801		8,815		19,386	0100	Gross Saving
1,036		1,567		199		0200	Non Financial Investment
9,764		7 249		19,187		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
0		7 347				0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
9,764		(98)		19,187		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
53,834		30 887		95,082		0600	Total Financial Uses
	44,070		23 638		75,895	0700	Total Financial Sources
						0800	Official Foreign Exchange Reserve
(13)	53	(25)	98	0	149	0900	Other Foreign Claims
6,826		12,470		4,766		1000	Currency and Deposits (Total)
1,210		(730)		2,475		1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
5,616		13,200		2,291		1020	Rupiah Currency and Deposits
749		1,334		1,616		1021	Currency and Coin
(672)		1,016		2,694		1022	Demand Deposits
227		372		(393)		1023	Saving Deposits
5,295		10,522		(1,625)		1024	Time Deposits
16		(43)		(1)			Other Rupiah Deposits
						1030	Postal and Cooperation Deposits
422	418	35	(409)	221	(111)	1100	Short Term Securities
1,672	15,127	(123)	6,636	17,110	9,658	1200	Credit (Total)
	4,992		5,441	14,398	3,389	1210	Bank Loans in Rupiah
1,753	1,549	(123)	1,321	2,629	(15)	1220	Other Institutions Loan in Rupiah
(80)	8,586		(126)	83	6,283	1230	Loans in Foreign Currency
3,633	1,132	(136)	3,643	38,813	5,255	1300	Stock and Participation
17,760	3,900	4,689	(8)	23,739	3,966	1400	Long Term Securities (Total)
11,043		3,567		13,904		1410	Government Bonds
6,717	3,900	1,122	(8)	9,835	3,966	1420	Other Bonds and Debentures
1,383	17,329	4,363	20,976	389	47,426	1500	Life Insurance and Pension Reserve
13,493	8,854	29,784	(5,904)	1,533	(2)	1800	Trade Credits
4,149	(24)	7,672	13	1,192	30	2000	Interbank Claims
4,509	(2,720)	(27,841)	(1,406)	7,318	9,523	9000	Miscellaneous Accounts
54,871	54,871	32 454	32 454	95,281	95,281		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		80 862		53 127		83 933
0200	Investasi Nonfinansial	118 843		82 651		147 622	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(37 981)		(29 524)		(63 689)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(37 981)		(29 525)		(63 689)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(8 567)		99 626		(22 835)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		29 414		129 151		40 854
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		693	3	(398)		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(4 258)		14 955	15	16 617	15
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	1 679		5 320		5 467	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(5 937)	0	9 634		11 150	
1021	Uang Kertas dan Logam	951		293		502	
1022	Giro	(8 426)		2 020		2 327	
1023	Tabungan	16					
1024	Deposito Berjangka	1 521		7 322		8 322	
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi				15		15
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	1 880	1 462	(2 710)	(108)	(3 145)	881
1200	Kredit (Jumlah)	(9 012)	8 136	539	(431)	732	1 169
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		6 185		(115)		(125)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(4 031)	1 594	628	181	732	201
1230	Kredit dalam Valas	(4 981)	357	(89)	(497)		1 093
1300	Modal Saham dan Penyertaan		10 777		142 461		20 781
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	1 450	2 416	(577)	5 899	(623)	0
1410	Surat Berharga Pemerintah						
1420	Surat Berharga Lainnya	1 450	2 416	(577)	5 899	(623)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		35		996		1 084
1800	Kredit Dagang	8 028	2 471	1 645	17 288	1 645	24 800
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	(6 654)	3 424	85 771	(36 571)	(38 061)	(7 876)
	JUMLAH	110 276	110 276	182 278	182 278	124 787	124 787

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
 2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan
- *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

INDONESIA SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH
OF INDONESIA FOR GOVERNMENT ENTERPRISES
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	3,833		3 708		40,594	0100	Gross Saving
70,456		78 006		75,508		0200	Non Financial Investment
(66,623)		(74 298)		(34,914)		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
(0)						0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
(66,623)		(74 298)		(34,914)		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
73,375		12 952		106,512		0600	Total Financial Uses
	139,998		87 250		141,426	0700	Total Financial Sources
						0800	Official Foreign Exchange Reserve
					0	0900	Other Foreign Claims
15,646		11 642		27,513		1000	Currency and Deposits (Total)
8,586		5 683		2,235		1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
7,060		5 959		25,278		1020	Rupiah Currency and Deposits
1,497		2 667		3,231		1021	Currency and Coin
(741)		155		17,849		1022	Demand Deposits
(139)		1 148		(349)		1023	Saving Deposits
6,558		2 012		4,074		1024	Time Deposits
(115)		(24)		473			Other Rupiah Deposits
						1030	Postal and Cooperation Deposits
1,255	(5)	49	(275)	271	632	1100	Short Term Securities
27	3,916	(59)	10 564	187	12,140	1200	Credit (Total)
	2,637		2 876		(488)	1210	Bank Loans in Rupiah
27	58	(59)	(30)	187	1,396	1220	Other Institutions Loan in Rupiah
	1,221		7 718		11,232	1230	Loans in Foreign Currency
19,221	44,239	7 670	65 774		101,356	1300	Stock and Participation
1,715	3,637	583	40	2,887	1,960	1400	Long Term Securities (Total)
(192)		(472)				1410	Government Bonds
1,907	3,637	1 055	40	2,887	1,960	1420	Other Bonds and Debentures
	590		600		2,688	1500	Life Insurance and Pension Reserve
7,782	21,183	5 762	8 077	2,830	11,518	1800	Trade Credits
						2000	Interbank Claims
27,729	66,438	(12 694)	2 469	72,824	11,131	9000	Miscellaneous Accounts
143,831	143,831	90 958	90 958	182,020	182,020		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P U	S S	P U	S S	P U	S S
0100	Tabungan Bruto		77 030		104 992		101 857
0200	Investasi Nonfinansial	61 996		82 562		76 437	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	15 034		22 430		25 420	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	15 034		22 430		25 420	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	32 104		(144 977)		48 284	
0700	Jumlah Sumber Finansial		17 070		(167 407)		22 864
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	65	(12)	3 178	13	1 659	72
	1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	24 040		(7 799)		(21 112)	
	1010 Uang & Simpanan dalam Valas	7 814		(3 800)		(12 154)	
	1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah	16 226		(3 999)		(8 958)	
	1021 Uang Kertas dan Logam						
	1022 Giro	16 132		(2 557)		(7 583)	
	1023 Tabungan	58		359		(23)	
	1024 Deposito Berjangka	36		(1 802)		(1 657)	
	1025 Simpanan Rupiah lainnya					304	
	1030 Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
	1100 Surat Berharga Jangka Pendek	418	840	(417)	(1 350)	(3 352)	(419)
	1200 Kredit (Jumlah)	(3 803)	(2 367)	(2 863)	(81)	67	50 490
	1210 Kredit Bank dalam Rupiah		(1 498)		44		(1 491)
	1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp	1 875		(1 642)		831	
	1230 Kredit dalam Valas	(5 678)	(869)	(1 221)	(125)	(764)	51 981
	1300 Modal Saham dan Penyertaan	5 274		(185 576)		(37 041)	
	1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	28 687	(20 921)	(84 974)	(57 572)	5 586	(25 356)
	1410 Surat Berharga Pemerintah	28 687	(20 921)	(60 466)	(57 572)	34 140	(25 356)
	1420 Surat Berharga Lainnya			(24 508)		(28 554)	
	1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun						
	1800 Kredit Dagang						
	2000 Rekening Antar Bank						
	9000 Rupa-rupa	(22 577)	39 530	133 474	(108 417)	102 477	(1 923)
	JUMLAH	94 100	94 100	-62 415	-62 415	124 721	124 721

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

INDONESIA SEKTOR PEMERINTAH
OF INDONESIA FOR GENERAL GOVERNMENT
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	108,813		181 082		179,123	0100	Gross Saving
90,213		113 721		123,886		0200	Non Financial Investment
18,600		67 361		55,238		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
(0)						0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
18,600		67 361		55,238		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
55,067		98 784		(818)		0600	Total Financial Uses
	36,467		31 423		(56,056)	0700	Total Financial Sources
						0800	Official Foreign Exchange Reserve
97	(69)	(184)	64			0900	Other Foreign Claims
32,275		2 425		(8,408)		1000	Currency and Deposits (Total)
3,443		(11 033)		(4,788)		1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
28,832		13 458		(3,620)		1020	Rupiah Currency and Deposits
749		1 334		1,616		1021	Currency and Coin
22,395		1 419		(7,211)		1022	Demand Deposits
388		1 508		(773)		1023	Saving Deposits
4,623		8 931		2,288		1024	Time Deposits
678		266		461			Other Rupiah Deposits
						1030	Postal and Cooperation Deposits
(8)				14	(0)	1100	Short Term Securities
(689)	(31,712)	506	(67 241)	38	20,824	1200	Credit (Total)
	(12,734)		898	371	(6,784)	1210	Bank Loans in Rupiah
(385)		321		(299)		1220	Other Institutions Loan in Rupiah
(304)	(18,977)	185	(68 139)	(34)	27,607	1230	Loans in Foreign Currency
(7,934)		5 680		(169)		1300	Stock and Participation
7,213	13,598	15 917	32 284	5,020	59,251	1400	Long Term Securities (Total)
8,582	13,598	14 349	32 284		59,251	1410	Government Bonds
(1,369)		1 568		5,020		1420	Other Bonds and Debentures
						1500	Life Insurance and Pension Reserve
						1800	Trade Credits
						2000	Interbank Claims
24,113	54,649	74 440	66 316	2,687	(136,130)	9000	Miscellaneous Accounts
145,280	145,280	212 505	212 505	123,068	123,068		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS
2002-2007,
2002-2007,

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2002		2003		2004	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(60,186)		(70,366)		(27 383)
0200	Investasi Nonfinansial			0			
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(60 186)		(70 366)		(27 383)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(60 185)		(70 366)		(27 383)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	148 044		(40 489)		103 862	
0700	Jumlah Sumber Finansial		208 229		29 877		131 244
0800	Cadangan Valas Pemerintah	(30 986)	(6 914)	6 141	24 878		27 891
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	16 662	(16 025)	(9 010)	(2 172)	12 864	(19 728)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(20 585)	(4 701)	(7 203)	(9 906)	(2 276)	1 614
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(20 698)	(4 702)	(8 049)	(9 946)	2 000	1 610
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	113	1	846	41	(4 275)	4
1021	Uang Kertas dan Logam						
1022	Giro	833		297		(3 538)	(0)
1023	Tabungan	173		720		(921)	
1024	Deposito Berjangka	(893)	1	(171)	41	(432)	(42)
1025	Simpanan Rupiah lainnya					615	47
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(2 080)	335	(2 178)	(1 610)	8 978	(41)
1200	Kredit (Jumlah)	(8 825)	(1 720)	(874)	445	127 535	(3 581)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(31)		733	0	(832)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	1 066		216		26	0
1230	Kredit dalam Valas	(9 891)	(1 689)	(1 090)	(288)	127 510	(2 749)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	12 187	309	5 224	(39)	36 705	1 695
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(18 526)	1 460	14 906	(115)	14 558	(461)
1410	Surat Berharga Pemerintah	(16 953)		4 151		13 965	
1420	Surat Berharga Lainnya	(1 573)	1 460	10 755	(115)	593	(461)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang					1 714	
2000	Rekening Antar Bank					0	
9000	Rupa-rupa	200 198	235 485	(47 495)	18 395	(96 219)	123 855
	JUMLAH	148 044	148 044	(40 489)	(40 489)	103 862	103 861

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber

2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

INDONESIA SEKTOR LUAR NEGERI
OF INDONESIA FOR REST OF THE WORLD
(MILIAR RUPIAH)
(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
2005		2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	(71,942)		(38,460)		(2,882)	0100	Gross Saving
						0200	Non Financial Investment
(71,942)		(38 460)		(2,882)		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
		0		0		0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
(71,942)		(38 460)		(2,882)		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
14,409		44 642		224,987		0600	Total Financial Uses
	86,351		83 101		227,869	0700	Total Financial Sources
	4,090		29,423		157,378	0800	Official Foreign Exchange Reserve
14,861	8,831	(23,089)	(17,280)	17,315	15,858	0900	Other Foreign Claims
3,679	53,941	(76,257)	(7,943)	6,572	(16,737)	1000	Currency and Deposits (Total)
2,817	53,802	466	(8,034)	2,924	(17,698)	1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
862	139	(76,724)	91	3,648	960	1020	Rupiah Currency and Deposits
						1021	Currency and Coin
1,676		(76,682)	(1)	2,921		1022	Demand Deposits
102		517		(625)		1023	Saving Deposits
(251)		(551)		1,117		1024	Time Deposits
(664)	139	(7)	92	235	960		Other Rupiah Deposits
						1030	Postal and Cooperation Deposits
8,438	6,330	2,205	(2,962)	17,320	(3,670)	1100	Short Term Securities
(24,494)	1,275	(185,876)	1,531	193,139	1,079	1200	Credit (Total)
	299		506		(256)	1210	Bank Loans in Rupiah
2,716		(3,091)		1,594		1220	Other Institutions Loan in Rupiah
(27,210)	975	(182,786)	1,026	191,544	1,335	1230	Loans in Foreign Currency
41,236	179	79,044	(5,240)	132,278	(142)	1300	Stock and Participation
33,701	1,924	25,991	(2,827)	32,180	(2,755)	1400	Long Term Securities (Total)
20,345		11,246		38,666		1410	Government Bonds
13,355	1,924	14,745	(2,827)	(6,485)	(2,755)	1420	Other Bonds and Debentures
						1500	Life Insurance and Pension Reserve
1,392		2,331	32,183	3,208	12,512	1800	Trade Credits
6,892		3,297		9,912		2000	Interbank Claims
(71,295)	9,781	216,997	56,215	(186,937)	64,346	9000	Miscellaneous Accounts
14,409	14,409	44 642	44 642	224,987	224,987		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA
2002-2007, (MILIAR RUPIAH)
2002-2007, (BILLION RUPIAH)

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR						2007
		2002		2003		2004		
		P	S	P	S	P	S	
		U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		178 276		225 011		181 223	
0200	Investasi Nonfinansial	147 396		317 520		250 645		538,726
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	30 880		(92 509)		(69 423)		(105,922)
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	1		0		(0)		
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	30 879		(92 509)		(69 422)		(105,922)
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	45 746		331 978		255 579		146,802
0700	Jumlah Sumber Finansial		14 866		424 487		325 001	
0800	Cadangan Valas Pemerintah							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(8 418)	(5 685)	(13 512)	(6 959)	1 824	(702)	10,188
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	802	7	(10 252)		(33 102)		41,914
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(13 337)		(6 170)		554		30,144
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	14 139	0	(4 097)		(33 671)		11,770
1021	Uang Kertas dan Logam	(15)		501		(26 004)		5,989
1022	Giro	8 438		8 648		6 705		(918)
1023	Tabungan	436		(2 013)		83		838
1024	Deposito Berjangka	5 273		(11 233)		(13 456)		5,757
1025	Simpanan Rupiah lainnya					(999)		103
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi	7	7	15		15		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	7 327	6 715	14 177	12 406	3 950	5 829	2,142
1200	Kredit (Jumlah)	169	17 161	(8 377)	60 895	3 827	111 125	(109)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		27 617		68 346		32 609	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	73		(2 446)		6 147		(1,209)
1230	Kredit dalam Valas	96	(10 456)	(5 931)	(7 451)	(2 320)	78 516	1,100
1300	Modal Saham dan Penyertaan	3 647	11 322	189 006	241 253	162 830	222 581	56,234
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	3 556	6 535	10 426	30 044	(17 338)	17 414	(15,258)
1410	Surat Berharga Pemerintah			6 136		(34 914)		(35,265)
1420	Surat Berharga Lainnya	3 556	6 535	4 290	30 044	17 576	17 414	20,007
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	5 290		6 690		8 082		430
1800	Kredit Dagang	8 290	2 651	18 580	6 668	12 789	11 390	12,483
2000	Rekening Antar Bank							(4,201)
9000	Rupa-rupa	25 082	(23 840)	125 240	80 180	112 717	(42 636)	42,979
	JUMLAH	193 142	193 142	649 498	649 498	506 224	506 224	685,528

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
 2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan
- *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

IA SEKTOR BISNIS
ESIA FOR PRIVATE ENTERPRISES
RUPIAH)
RUPIAHS)

TAHUN/YEAR					FOF CODE	TRANSACTION CATEGORY
05	2006 ^{*)}		2007 ^{**)}			
S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S		
432,804		467,577		497,178	0100	Gross Saving
	620,008		619,477		0200	Non Financial Investment
	(152 431)		(122,298)		0300	Net Lending/Borrowing = 0100-0200
	0				0400	Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
	(152 431)		(122,298)		0500	Net Financial Investment = 0600-0700
	323 518		903,455		0600	Total Financial Uses
252,724		475 949		1,025,754	0700	Total Financial Sources
					0800	Official Foreign Exchange Reserve
16,386	(51,331)	(58,753)	12,732	16,578	0900	Other Foreign Claims
25,800	53,085	9,193	116,379		1000	Currency and Deposits (Total)
	(1,514)		30,914		1010	Foreign Exchange Currency and Deposits
	54,599		85,464		1020	Rupiah Currency and Deposits
	10,669		12,925		1021	Currency and Coin
	20,647		40,174		1022	Demand Deposits
	5,643		(91)		1023	Saving Deposits
	17,327		31,117		1024	Time Deposits
	314		1,340			Other Rupiah Deposits
25,800	-	9,193			1030	Postal and Cooperation Deposits
11,010	(3,110)	(1,205)	2,116	14,410	1100	Short Term Securities
32,643	1,441	(94,598)	1,793	279,188	1200	Credit (Total)
38,845	-	943	148	64,822	1210	Bank Loans in Rupiah
(732)	456	256	634	16,848	1220	Other Institutions Loan in Rupiah
(5,470)	985	(95,797)	1,010	197,518	1230	Loans in Foreign Currency
113,259	464,912	519,376	542,966	641,936	1300	Stock and Participation
46,558	11,946	16,275	5,913	5,539	1400	Long Term Securities (Total)
	17,638		15,004		1410	Government Bonds
46,558	(5,691)	16,275	(9,091)	5,539	1420	Other Bonds and Debentures
	400		43,979		1500	Life Insurance and Pension Reserve
1,392	58,352	59,344	82,352	63,083	1800	Trade Credits
24	(2,978)		1,769		2000	Interbank Claims
5,652	(209,201)	26,316	93,457	5,019	9000	Miscellaneous Accounts
685,528	943 526	943 526	1,522,932	1,522,932		TOTAL

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 1070

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

TABEL 15. NERACA ARUS DANA SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
TAHUN 2007 (DALAM MILIAR RUPIAH))**
TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR
NON BANKS FINANCIAL SECTORS, 2007 (BILLION RUPIAHS) **)

KODE NAD	KATEGORI TRANSAKSI TRANSACTION CATEGORY	ASURANSI		PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		PEGADAIAN		DANA PENSIUN		TOTAL		FOF CODE
		INSURANCES		FINANCE COMPANIES		PAWNSHOPS		PENSION FUNDS		TOTAL		
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		6,149		3,966		391		8,881		19,386	0100
0200	Investasi Nonfinansial	(789)		777		54		157		199		0200
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	6,938		3,189		336		8,724		19,187		0300
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500											0400
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	6,938		3,189		336		8,724		19,187		0500
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	54,683		16,777		1,325		22,297		95,082		0600
0700	Jumlah Sumber Finansial		47,746		13,588		988		13,573		75,895	0700
0800	Cadangan Valas Pemerintah											0800
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		(12)	0	161				0	0	149	0900
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	1,957		2,372		(30)		467		4,766		1000
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	1,528		799		(2)		150		2,475		1010
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	428		1,573		(27)		316		2,291		1020
1021	Uang Kertas dan Logam	1,542		74						1,616		1021
1022	Giro	1,503		994		11		185		2,694		1022
1023	Tabungan	(40)		(135)		(32)		(186)		(393)		1023
1024	Deposito Berjangka	(2,585)		649		(7)		318		(1,625)		1024
1025	Simpanan Rupiah lainnya	8		(8)		(0)		(1)		(1)		1025
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi											1030
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(6)		283	(116)			(56)	5	221	(111)	1100
1200	Kredit (Jumlah)	1,584	426	14,580	8,528	1,239	696	(293)	8	17,110	9,658	1200
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		397	14,398	2,288		696		8	14,398	3,389	1210
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	1,638	(15)	18		1,239		(266)		2,629	(15)	1220
1230	Kredit dalam Valas	(54)	43	164	6,240			(27)		83	6,283	1230
1300	Modal Saham dan Penyertaan	34,247	3,271	8	1,984	(1)		4,559		38,813	5,255	1300
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	16,391		60	3,155		557	7,288	254	23,739	3,966	1400
1410	Surat Berharga Pemerintah	10,782						3,122		13,904		1410
1420	Surat Berharga Lainnya	5,609		60	3,155		557	4,166	254	9,835	3,966	1420
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		33,888					389	13,539	389	47,426	1500
1800	Kredit Dagang	1,465				68	(2)			1,533	(2)	1800
2000	Rekening Antar Bank	1,243		(538)	30			487		1,192	30	2000
9000	Rupa-rupa	(2,198)	10,173	12	(154)	48	(263)	9,456	(233)	7,318	9,523	9000
	TOTAL	53,894	53,894	17,554	17,554	1,379	1,379	22,454	22,454	95,281	95,281	

Keterangan:

1. P = Penggunaan, S = Sumber
2. Jumlah mungkin tidak sama karena pembulatan

*) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

Note:

1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
2. The total may be not equal due to rounding

*) Preliminary Figures
 **) Very Preliminary Figures